

Laporan Penelitian  
Kelompok.

# KKN IAIN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

( Suatu Studi Peran dan Strategi Menumbuhkan Swadaya Masyarakat Pedesaan )



## TIM PENELITI

Ketua : Drs. H. Iskandar Zulkarnain  
Anggota : 1. Drs. M. Fuad  
          2. Drs. Zainal Abidin  
          3. Drs. Supriatna  
          4. Drs. Suisyanto  
          5. Drs. Ahmad Rodli

---

PROYEK PERGURUAN TINGGI AGAMA  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA

Nomor : 129 LP /Th:

## PENGANTAR PEMIMPIN PROYEK

Alhamdulillah, bahwa penelitian dengan judul "KKN IAIN DAN PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA (*Suatu Studi Peran dan Strategi Menumbuhkan Swadaya Masyarakat Pedesaan*) yang dilaksanakan pada tahun 1994/1995, telah selesai pada waktunya.

Sehubungan telah selesainya penelitian tersebut kami Pemimpin Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga menyampaikan terima kasih kepada Tim Peneliti atas kerjasamanya sejak dari penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian Laporan Akhir.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini kami ucapkan terimaa kasih.

Yogyakarta, Februari 1995

Pemimpin Proyek Peningkatan Perguruan  
Tinggi Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga

DRS. MASYHUDI, BBA

NIP. 150028175

## KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillah penelitian yang berjudul "*KKN IAIN DAN PEMBANGUNAN SUBERDAYA MANUSIA* (Suatu Studi Peran Dan Strategi Menumbuhkan Swadaya Masyarakat Pedesaan)" atas hidayah dan pertolongan Allah SWT dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Selanjutnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor dan Pemimpin Proyek PTA IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian.
2. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi layanan dan bantuan sehingga dapat terselesaikan penelitian ini dengan lancar.

Peneliti menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan kemampuan dan waktu yang tersedia. Namun demikian peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita bersama.

Yogyakarta, Februari 1995

Peneliti

## DAFTAR ISI

PENGANTAR PEMIMPIN PROYEK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah dan Pentingnya Penelitian .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Nilai Kegunaan .....	6
D. Landasan Pemikiran .....	7
E. Metodologi .....	14
F. Kerja Lapangan .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....	18
A. Desa Lumbungrejo .....	18
B. Desa Mardikorejo .....	31
BAB III KKN IAIN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA ...	44
A. Program KKN IAIN Sunan Kalijaga .....	44
B. Peran DPL Dalam Pelaksanaan KKN .....	60
C. Peran Mahasiswa KKN dalam Pembangunan Pedesaan .....	85
D. Pendekatan, Faktor Pendorong dan Penghambat .....	99
BAB IV PENUTUP .....	107
A. KESIMPULAN .....	107
B. SARAN-SARAN .....	112
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	116

## DAFTAR TABEL

NO TABEL	NAMA TABEL	HALAMAN
01.	Jumlah Penduduk Desa Lumbungrejo menurut jenis kelamin 1994	19
02.	Jumlah Penduduk Desa Lumbungrejo menurut pengelompokkan umur tahun 1994	20
03.	Jumlah akseptor KB menurut Kelompok Usia Desa Lumbungrejo.	20
04.	Mutasi/Perubahan Penduduk	21
05.	Jenis Mata Pencaharian Penduduk Tahun 1994	22
06.	Sarana perekonomian desa Lumbungrejo tahun 1994.	23
07.	Alat transportasi	24
08.	Produktifitas Daerah	25
09.	Tingkat pendidikan	26
10.	Sarana pendidikan	26
11.	Afiliasi Politik Pemilu 1992	29
12.	Jumlah penduduk menurut agama tahun 1994	30
13.	Jumlah tempat ibadah	30
14.	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 1994	31
15.	Jumlah penduduk menurut usia 1994	32
16.	Jumlah akseptor KB	33
17.	Jenis pekerjaan penduduk	34
18.	Jumlah sarana perekonomian	36
19.	Jumlah sarana perekonomian lainnya	37
20.	Jenis ternak	37
21.	Jumlah sarana komunikasi transportasi	38

22.	Hasil pemungutan suara	40
23.	Jumlah penduduk menurut pendidikan	41
24.	Jumlah sarana pendidikan	41
25.	Jumlah sarana ibadah	43
26.	Hubungan dan pengaruh dari peranan dan pengalaman menjadi DPL - KKN	70
27.	Peran DPL dalam menjalankan tugas dan kewajiban	73
28.	Peran DPL dalam melakukan evaluasi dan pemantauan	75
29.	Pendekatan dan peran mahasiswa peserta KKN	94
30.	Alokasi dana KKN IAIN Sunan Kalijaga Angkatan ke-26 di Kabupaten Sleman	95
31.	Sumber dana dalam pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Angkatan ke-26 di Kabupaten Sleman	96
32.	Alokasi dana yang dikeluarkan KKN IAIN Sunan Kalijaga Angkatan ke-27 di Kabupaten Sleman.	97
33.	Sumber dana KKN IAIN Sunan Kalijaga Angkatan ke-27 di Kabupaten Sleman.	98

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah dan Pentingnya Penelitian

IAIN sebagai lembaga perguruan tinggi yang mengembangkan ilmu ke-Islaman dituntut untuk selain mengembangkan ilmu dengan pengajaran dan penelitian, ia juga harus menyiapkan diri dan civitas akademiknya menjadi "agen sosial" untuk mempercepat proses pembangunan bangsa, terutama di daerah pedesaan. Artinya, sebagai suatu perguruan tinggi agama di Indonesia IAIN terbebani melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Ilmiah dan Pengabdian pada Masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu Darma Perguruan Tinggi merupakan bentuk yang memperpadukan ketiga darma tersebut (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui KKN, IAIN dan mahasiswa harus mampu mengaplikasikan teori dan ketrampilannya untuk dijadikan dasar pemikiran dalam pengabdian kepada masyarakat (pedesaan), antara lain "mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis-mandiri yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan program pembangunan nasional" dan meningkatkan kualitas dan sumber daya masyarakat desa. Oleh sebab itu orientasi KKN IAIN diarahkan pada "pembinaan peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya insani melalui pembangunan manusia seutuhnya".

Dari orientasi tersebut tujuannya ingin mengembangkan harkat dan martabat serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa, lahir dan batin dalam suasana kehidupan yang agamis, dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mengapa masyarakat desa menjadi khalayak sasaran KKN IAIN ?. Ada dua macam sindrom yang kerap disebut sebagai dasar pertimbangan mengapa masyarakat desa memperoleh prioritas digarap dalam kegiatan pembangunan yaitu sindrom kemiskinan dan sindrom *inertia* (lamban dan statis). Sindrom kemiskinan di kalangan masyarakat desa berdimensi majemuk, sangat kompleks dan berkaitan: produktifitas pertanian rendah, angka pengangguran tinggi, tingkat nutrisi buruk, tingkat pendidikan rendah dan sebagainya. Kemudian sindrom *inertia* berakar pada fatalisme (serah diri pada nasib), sifat serba patuh dan tergantung serta pasivisme. Sindrom ini kerap kali dianggap sebagai konsekuensi dari hal yaitu: (1) suatu struktur sosial yang meletakkan kelompok elit tertentu dalam posisi yang dominan dan sangat determinan terhadap proses pengambilan keputusan-keputusan krusial, serta (2) sistim kepercayaan yang masih berakar pada magi dan dengan pemahaman ajaran sangat normatif.

Desa dengan ciri dan keterbelakangan historis, diliputi oleh keterbatasan-keterbatasan seperti kekurangan ketrampilan teknologi, modal, pengetahuan serta peluang kerja. Di samping itu semua, juga terdapat kekurangan dalam kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan, terutama sekali dalam arti parti-

sipasi yang termotivasi. Pembangunan desa untuk menjadi desa maju, makmur dan swasembada, memerlukan upaya pembangunan dengan banyak segi. Dalam hal ini yang diperlukan bukan hanya pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, sosial dan budaya, tetapi harus juga pembangunan mental spiritual. Dari tolok penilaian ini, terlihat bahwa peran agama harus diperhitungkan dalam ikut membangun masyarakat pedesaan. Ini berarti akan terungkap bagaimana masyarakat pedesaan merasa terpacu untuk meningkatkan tarap hidupnya karena dorongan ajaran agama.

Dasar pemikiran di atas merupakan indikasi pentingnya melakukan penelitian pelaksanaan KKN IAIN dan Pembangunan Sumberdaya Manusia di daerah pedesaan. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa Balai Pengabdian Pada Masyarakat (BPPM) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan pusat percontohan informasi BPPM IAIN se-Indonesia, terutama tentang pelaksanaan KKN-nya.

Penelitian ini akan dilakukan di dua desa, di daerah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa pertama ditetapkan di Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, dengan ciri utama sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Walaupun desa ini terletak di kota kecamatan, namun masih memiliki ciri utama "miskin". Hal ini karena tertinggal dalam hal tenaga kerja terdidik, karena pengaruh proses urbanisasi yang juga sudah jelas mengganggu pembangunan pedesaan, tertinggal akan informasi dan pengetahuan fungsional yang dapat diguna-

kan sehari-hari untuk meningkatkan taraf hidup; tertinggal akan ketrampilan dan sering masih sangat terikat pada kekuatan-kekuatan tradisi yang acap kali mengekang gerak pembangunan dan pembaharuan. Desa kedua ditetapkan di desa Mardikorejo, Kecamatan Tempel, sebagai desa menuju swasembada, yaitu di desa ini pembangunan yang berjalan sudah diarahkan kepada sumber-sumber daya manusia, sumber-sumber daya alam dan modal, melalui berbagai partisipasi dari swadaya masyarakat desa tersebut.

Oleh karena itu, bidang-bidang kegiatan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dikembangkan dan dilaksanakan di pedesaan dikelompokkan ke dalam 4 bidang, meliputi:

1. Bidang agama.
2. Bidang administrasi pemerintahan desa.
3. Bidang prasarana fisik dan lingkungan hidup.
4. Dan bidang pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).

Di dalam pengembangan dan pelaksanaan bidang-bidang kegiatan tersebut dalam masyarakat desa, sekurangnya terdapat tiga komponen penting yang selalu terlibat dalam perencanaan dan pembinaan pedesaan, yaitu *policy makers* dan *agens* (dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa) serta *adopters* (masyarakat desa). Ketiga unsur ini saling terkait dalam program KKN yang dirancang, dimaksudkan supaya pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah dirumuskan. Untuk itu diperlukan peran dan strategi pendekatan yang memadai dan sesuai dengan kondisi masyarakat pedesaan tersebut, sehingga peran dan strategi itu dapat menumbuhkan swadaya masyarakat.

Dalam pelaksanaan program KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta banyak kendala dan hambatan yang dihadapi para dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa di dalam menumbuhkan swadaya masyarakat. Hal tersebut terletak pada peran dan strategi pendekatan mereka kepada masyarakat pedesaan; maka dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah :

1. Sejauhmanakah peran DPL dan mahasiswa KKN IAIN Sunan Kalijaga dalam melaksanakan program kerja KKN di desa ?
2. Apakah peranan yang telah dilakukan dapat menumbuhkan swadaya masyarakat, sehingga mencapai sasaran ?
3. Strategi dan pendekatan apakah yang dipakai untuk menumbuhkan dan menggerakkan swadaya masyarakat ?
4. Variabel-variabel apakah yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan program KKN ?

## B. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari segi historis dan fungsinya, tingginya peranan perguruan tinggi (PT) dalam membantu masyarakat pedesaan tidak diragukan lagi. Beberapa produk pengabdian masyarakat yang telah dilakukan telah banyak memberikan sumbangan dan perubahan kepada masyarakat desa untuk membangun, terutama bentuk pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN). Demikian juga KKN yang dilaksanakan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam membangun sumberdaya masyarakat desa.

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan :

1. Merumuskan dan menggambarkan DPL dan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam melaksanakan program kerja KKN di desa.
2. Menggambarkan proses pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga dalam menumbuhkan swadaya masyarakat.
3. Mencari bentuk strategi dan pendekatan yang tepat dalam menggerakkan swadaya masyarakat desa melalui program kerja KKN.
4. Mengungkapkan variabel-variabel yang menjadi faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan program kerja KKN.

C. Nilai Kegunaan

Dengan demikian diharapkan dari hasil penelitian ini memberi masukan pemikiran dan langkah kebijakan kepada Perguruan Tinggi (PT), pemerintah dan masyarakat dalam memprogram pelaksanaan KKN; karena dirasakan akhir-akhir ini adanya kejenuhan dari masyarakat dalam menerima mahasiswa KKN.

Di samping itu, dalam memasuki era pembangunan jangka panjang tahap II, Kuliah Kerja Nyata (KKN) masih dibutuhkan untuk berorientasi sentral pada sumberdaya manusia dan kelembagaan sehingga dapat menggerakkan swadaya. Jika demikian setiap kegiatan Tridarma, termasuk KKN, sangatlah dituntut untuk berorientasi pada kaidah-kaidah yang lebih profesional dan ilmiah, dan mengikuti kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang.

D. Landasan Pemikiran

Suatu ciri khas keadaan pedesaan di Indonesia, terutama di Jawa, maka seperti yang pada umumnya telah diakui oleh para ahli, Pemerintah serta Lembaga-lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat, masalah pokoknya adalah masalah kemiskinan, keterbelakangan dan ketidaktahuan (3K). Kemiskinan masyarakat di daerah pedesaan dicirikan sebagai orang yang tidak punya harta milik, pendidikan yang rendah, kesehatan yang kurang, tidak punya pengaruh atau kekuasaan, dan sebagainya. Fenomena tersebut merupakan suatu sindrome yaitu jalinan fenomena yang relatif sulit diberantas (Hagul, 1985).

Keterbelakangan masyarakat pedesaan sebenarnya tidak luput pula berkaitan dengan kemiskinan dan ketidaktahuan, yaitu suatu keterbelakangan dalam partisipasi pembangunan dimana penguasaan modal pengetahuan relatif sangat rendah. Itu semua akibat dari kurangnya pengembangan sumber daya manusia, kurangnya pengembangan sumber daya alam, kurangnya lapangan/peluang/kesempatan kerja dan berusaha, keterasingan dari sumber-sumber kemajuan, dan adanya struktur masyarakat yang menghambat (Mubyarto, 1985). Sumber dari sebab-sebab terjadinya keadaan tersebut adalah bersifat historis. Karena belum adanya perubahan yang mendasar pada kehidupan pedesaan tersebut, maka kondisi kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan tersebut masih berlangsung terus. Dalam kondisi pedesaan yang sedemikian partisipasi golongan masyarakat miskin di dalam pembangunan pasti sulit diwujudkan.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh wilayah dan masyarakat pedesaan itu telah mengandung berbagai upaya untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut dikenal dengan istilah pembangunan atau pengembangan pedesaan. Pembangunan dan pengembangan pedesaan merupakan proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yang disertai meningkatnya taraf hidup sebagai akibat dari proses tersebut. Untuk mengentaskan penduduk pedesaan dari kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangannya itu dikembangkan 7 indikator pembangunan pedesaan, meliputi:

1. Perubahan produktifitas pedesaan
2. Perubahan tingkat kesempatan kerja, pengangguran dan sebagainya.
3. Perubahan dalam pembagian pendapatan.
4. Perubahan dalam struktur kekuasaan.
5. Perubahan tingkat mobilitas sosial.
6. Perubahan dalam nilai, kepercayaan dan sikap terhadap lingkungan sosial yang lebih luas.
7. Perubahan sasaran pelayanan sosial (Mubyarto, 1985).

Dengan tercapainya sasaran-sasaran tersebut akan tercipta landasan yang mantap bagi masyarakat pedesaan di Indonesia untuk memasuki tahap awal dari proses lepas landas dari program pembangunan nasional. Konsep lepas landas dalam upaya pembangunan nasional dapat diartikan sebagai sifat kemandirian yakni kemampuan membangun dengan kekuatan sendiri. Konsep ini bertujuan bahwa pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, yang mencakup upaya

peningkatan semua segi kehidupan. Kapasitas ini menurut Effendi diperinci menjadi lima aspek, yakni: produksi, pemerataan, pemberian kekuasaan dan wewenang, kelangsungan untuk berkembang, dan kesadaran akan interdependensi (Effendi, 1990). Oleh karenanya, kebutuhan hakiki merupakan "conditio sine qua non" dari pencapaian kualitas manusia. Artinya, kebutuhan hakiki bukanlah "hierarchy of needs" dari Maslow yang hanya memuaskan nafsu manusiawi, tetapi kebutuhan hakiki yang selaras dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi (lihat Ancok, 1990).

Dasar pemikiran di atas berarti menggaris-bawahi bahwa hakekat pembangunan bukan semata-mata pelaksanaan proyek-proyek, melainkan juga semakin dinamika sistem sosial secara keseluruhan dan simultan. Di dalam konsepsi pembangunan semacam ini, agama sebagai rujukan tingkah laku dan sumber utama persepsi mengenai realitas sosial menempati posisi sangat penting. Dasar pemahaman teologis yang dilakukan secara kritis dan kontekstual, yang berupaya menanggapi berbagai permasalahan sosial, dapat digunakan sebagai sumber daya penting dalam ikut memacu dinamika masyarakat (Chirzin, 1991). Refleksi teologis, agama yang dahulu dihadapi secara taktis, diperlakukan secara manipulatif dan dianggap sebagai penghambat perubahan, kini pada gilirannya tidak hanya telah mampu menggerakkan partisipasi sosial, tetapi sangat diperlukan untuk peletak dasar upaya pembangunan dan capaiannya.

Dalam strategi pembangunan pedesaan partisipasi masyarakat desa mutlak diperlukan. Tetapi partisipasi yang diperlukan itu tidak saja dalam arti ikut bekerja bersama-sama, melainkan partisipasi yang meliputi peran serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan rumusan proyek-proyek pembangunan nasional IAIN diperlukan untuk (1) memenuhi kebutuhan akan ketenagaan jasa ahli agama (Islam); (2) menciptakan kesatuan dan keutuhan nasional melalui partisipasi dan keterlibatannya dalam pembangunan; (3) mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat melalui motivasi keagamaan. Oleh karenanya IAIN sangat memenuhi harapan masyarakat, meliputi: *access* dan *equity* warga masyarakat Indonesia, usaha pemeliharaan pengembangan ilmu pengetahuan keislaman dan kebudayaan Islam, usaha mewujudkan masyarakat yang berkualitas yang dirumuskan dalam pembangunan nasional.

Cita-cita yang akan diwujudkan dalam pembangunan oleh IAIN diarahkan pada pembangunan sosial budaya menuju terbentuknya Manusia Indonesia Seutuhnya, dan pencapaiannya melalui lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan. Perspektifnya menuntut dan menghasung IAIN untuk secara operasional merumuskan program-program kegiatan akademisnya yang dapat memacu pembangunan masyarakat pedesaan.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh IAIN merupakan program intra kurikuler yang sampai saat ini merupakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat pedesaan. Sasaran utama yang hendak dicapai melalui kegiatan KKN, ialah: (1) *personality development*, yang berarti dengan

adanya interaksi sosial selama KKN diharapkan adanya perubahan sikap pada mahasiswa berkenaan dengan dedikasinya dan orientasinya terhadap masyarakat; (2) di dalam masyarakat sendiri diharapkan terjadi perubahan-perubahan (community development) baik dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak selaras dengan tujuan pembangunan; dan (3) dampak dari KKN terhadap institutional development, tujuannya untuk memperoleh masukan yang sangat berguna bagi evaluasi dan pembangunan relevansi kurikulum IAIN dan kebutuhan masyarakat.

KKN IAIN yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen adalah pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan agama Islam kepada masyarakat, program ini merupakan kegiatan memperkenalkan dan meneruskan, membina kesadaran, mengaplikasikan ilmu pengetahuan, memberikan bimbingan, konsultasi dan membantu perencanaan dan pelaksanaan program tertentu dalam masyarakat desa yang sesuai dengan ilmu-ilmu keislaman.

Ada dua dasar pertimbangan penting yang dijadikan pedoman mengapa KKN IAIN diorientasikan ke desa. Pertimbangan pertama adalah desa dengan segala kompleksitasnya masih dililit sindrom kemiskinan, dan pertimbangan kedua adalah faktor keterbelakangan dan ketidaktahuan (inertia). Dari dasar pertimbangan ini oleh pemerintah, masyarakat desa memperoleh prioritas digarap dalam kegiatan pembangunan. Faktor kemiskinan di kalangan masyarakat desa berdimensi majemuk, sangat kompleks dan saling berkaitan, yaitu: produktifitas pertanian rendah, angka pengangguran tinggi, tingkat

nutrisi buruk, pendidikan rendah dan sebagainya. Sedang faktor *inertia* berakar pada serah diri pada nasib (fatalisme), sifat serba patuh dan tergantung serta pasivisme. Melihat kenyataan semacam ini, KKN yang diprogramkan IAIN mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan.
2. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin.
3. Menempatkan agama sebagai pendorong dan penggerak serta sumber nilai bagi masyarakat, sehingga operasionalisasi pembangunan merupakan amal ibadah mereka.
4. Sebagai umpan balik dalam perbaikan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Sehubungan dengan tujuan di atas, kegiatan KKN IAIN diprogram meliputi kegiatan: Bidang agama, Bidang prasarana fisik dan lingkungan hidup, Bidang administrasi pemerintahan desa, dan Bidang pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan keluarga berencana (KB).

Secara ideal program-program tersebut akan mampu meningkatkan swadaya dan sumberdaya masyarakat desa, sehingga mempunyai target sebagai berikut : (1) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan pembangunan baik yang bersifat material maupun mental spiritual; (2) mening-

katkan ketrampilan masyarakat dalam memecahkan problematika yang mereka hadapi; (3) penghayatan dan pengamalan keagamaan masyarakat akan semakin baik, sehingga masyarakat insaf akan pentingnya peran agama dalam setiap dinamika pembangunan; (4) mengembangkan harkat dan maratabat serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat pedesaan, dalam suasana agamis, adil makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Desa dengan ciri dan keterbatasan historis, diliputi oleh keterbatasan-keterbatasan seperti kekuarangan ketrampilan teknologi, modal, pengetahuan serta peluang kerja. Di samping itu semua, juga terdapat kekurangan dalam kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan, terutama sekali dalam arti partisipasi yang termotivasi. Pembangunan desa untuk menjadi desa maju, makmur dan swasembada memerlukan upaya pembangunan dengan banyak segi. Dalam hal ini yang diperlukan bukan hanya pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, sosial budaya, tetapi harus juga pembangunan mental spiritual. Dari tolok penilaian ini, terlihat bahwa peran agama harus diperhitungkan dalam ikut serta membangun masyarakat pedesaan. Ini berarti akan terungkap bagaimana masyarakat pedesaan merasa terpacu untuk meningkatkan taraf hidupnya karena dorongan agama. Oleh sebab itu pelaksanaan KKN IAIN difokuskan antara lain "mempercepat upaya pengembangan masyarakat kearah terbi- nanya masyarakat *dinamis-mandiri* yang siap menempuh peru- bahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan program pembangunan nasional.

## E. Metodologi

Sasaran studi ini meliputi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), mahasiswa peserta KKN, masyarakat desa yang ditempati KKN, dan aparat pemerintahan desa terkait. Dalam pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*, dengan pertimbangan :

1. Pengambilan sampel didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subyek yang dijadikan sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan; meliputi:
  - a. DPL, yaitu mereka yang ditunjuk untuk menjadi DPL dalam satu kegiatan KKN
  - b. Mahasiswa peserta KKN, yaitu mereka yang mendaftarkan diri untuk dapat mengikuti kegiatan KKN
  - c. Masyarakat yaitu, sebagian masyarakat dan tokoh masyarakat yang meliputi dan terlibat langsung dengan pelaksanaan kegiatan program KKN
  - d. Pemerintah terkait, yaitu dari para pamong desa, aparat kecamatan, dan aparat kabupaten.

Pengumpulan data dilakukan dengan : (1) tehnik observasi berpartisipasi, suatu tehnik yang lazim digunakan oleh para antropolog. Dengan tehnik ini peneliti mengamati pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga di desa, terutama menyangkut peran, pendekatan dan strategi DPL dan mahasiswa yang berKKN

kepada masyarakat desa, pengamatan tentang partisipasi dan tingkat swadaya masyarakat sehubungan dengan program KKN yang ditawarkan; dan pengamatan terhadap pelaksanaan KKN; (2) teknik wawancara, apakah wawancara informal maupun wawancara berstruktur, digunakan untuk menggali data tentang : pengetahuan, pengalaman, pendapat, pandangan, penilaian, persepsi, sikap, motif dan alasan masyarakat desa menggerakkan swadaya-nya untuk pembangunan bersama program KKN IAIN Sunan Kalijaga. Data seperti ini akan digali dari beberapa responden kunci, tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta aparat pemerintah terkait; (3) penyebaran angket juga dilakukan kepada DPL, mahasiswa peserta KKN, tokoh masyarakat dan pemuda (key informan), daftar angket dibuat berbeda sesuai dengan peran dan fungsi mereka masing-masing yang orientasinya menanyakan tentang pelaksanaan program KKN IAIN dan pembangunan sumberdaya masyarakat pedesaan.

Untuk melengkapi data tentang swadaya masyarakat, sumberdaya masyarakat, peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, kepedulian dan peran aparat desa, serta pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga, digunakan metode penggunaan data pengalaman individu dari warga desa. Guna dari data semacam ini bahwa si peneliti dapat memperoleh pandangan dari dalam, melalui reaksi, tanggapan, interpretasi dan penglihatan para warga desa tentang masalah yang timbul di desa, terutama masalah kemiskinan, kemunduran dan keterbelakangan. Di samping, digunakan pula data dokumentasi dari hasil pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga tahun-tahun sebelumnya.

Dari data yang terkumpul, baik data bersifat monografis dan berwujud kasus-kasus, serta data yang berjumlah besar yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori, akan dianalisis dengan *analisa deskriptif* dengan memakai tabulasi silang (*cross tabulation*).

#### F. Kerja Lapangan

Serangkaian kegiatan penelitian ini direncanakan selesai dalam waktu 6 bulan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Persiapan 1 bulan :
  - orientasi di daerah penelitian
  - penyelesaian administrasi dan ijin penelitian
2. Pelaksanaan tahap I, selama 1 bulan :
  - Seminar kecil untuk merumuskan konsep-konsep operasional penelitian
  - studi kepustakaan
  - penyiapan instrumen penelitian
  - penentuan sampel dan strategi penelitian
3. Pelaksanaan tahap II, selama 2 bulan :
  - tahap penelitian lapangan dan pengumpulan data
4. Pelaksanaan tahap III, selama 1 bulan :
  - Koding dan editing data
  - tabulasi data
  - analisa data

## 5. Tahap terakhir, selama 1 bulan :

- penulisan draft laporan
- Seminar kecil atau seminar hasil laporan penelitian, sebagai langkah untuk masukan laporan akhir.
- Penulisan laporan akhir dan pengandaan.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi empat bab, meliputi :

Bab pertama adalah pendahuluan, yang di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah dan pentingnya penelitian ini dilakukan, tujuan penelitian, nilai kegunaan, landasan pemikiran, metodologi, kerja lapangan dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua memaparkan diskripsi lokasi penelitian, meliputi diskripsi desa Lumbungrejo dan desa Mardikorejo, meliputi: keadaan demografi, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan sosial, politik dan budaya, serta kehidupan beragama.

Bab tiga menjelaskan tentang KKN IAIN dan pembangunan masyarakat desa, meliputi: program KKN IAIN Sunan Kalijaga, peranan DPL dan Mahasiswa, pelaksanaan dan pendekatan yang dipakai, serta faktor penunjang dan penghambat.

Pada bagian akhir bab, yaitu bab empat berisi kesimpulan dan saran, yang kemudian dilampirkan pula daftar bacaan dan lampiran-lampiran.

## BAB II DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

### A. Desa Lumbungrejo

#### 1. *Keadaan Demografi*

Seperti telah dikemukakan di depan bahwa penelitian ini mengambil lokasi di dua desa dalam wilayah kabupaten Sleman. Dua desa tersebut adalah desa Lumbungrejo dan desa Mardikorejo yang keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Tempel. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan metodologis bahwa desa Lumbungrejo termasuk Desa Tertinggal (IDT), sedangkan Mardikorejo sebagai desa menuju swasembada, dimana pembangunan yang berjalan sudah diarahkan pada sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan modal melalui partisipasi dari swadaya masyarakat.

Dengan karakteristik masyarakat seperti tersebut di atas diharapkan menjadi relevan untuk memahami kaitan antara agama Islam yang dibawa oleh mahasiswa KKN dalam memicu gerak masyarakat desa dengan perubahan sosial, dalam kaitannya dengan dampak modernisasi ekonomi (perdagangan bebas) politik dan pendidikan di tingkat lokal.

Dalam konteks seperti ini, desa Lumbungrejo diharapkan mewakili daerah tertinggal (IDT) dimana kesadaran beragama serta pengetahuan tentang agama yang masih terbelakang sehingga agama belum dapat dijadikan motivasi kehidupan duniawi. Dengan pertimbangan metodologis semacam itu diharapkan dampak dari variasi tanggapan atas perubahan sosial yang

berkaitan dengan modernisasi ekonomi, politik dan pendidikan, dapat terungkap dengan jelas.

Desa Lumbungrejo memiliki karakteristik wilayah, kependudukan dan ketenagakerjaan yang berbeda-beda. Pertama akan dikemukakan gambaran mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 1994

Nama Desa	Jumlah Penduduk	
	Laki-laki/KK	Perempuan/KK
Lumbungrejo	2861/1569	2861/424

Sumber : Monografi Desa

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa tidak ada perbedaan antara komposisi penduduk laki-laki dan perempuan. Dari komposisi penduduk tersebut, laki-laki yang menjadi kepala keluarga memang masih besar, akan tetapi perempuan yang menjadi kepala keluarga ternyata cukup besar. Hal ini merupakan persoalan tersendiri dalam budaya masyarakat Jawa, yaitu wanita masih dianggap kurang cekatan, tidak punya kekuatan dan sifat-sifat kelemahan yang lain. Disamping itu penduduk desa Lumbungrejo yang dapat dikategorikan usia lanjut ternyata cukup besar. Komposisi penduduk menurut umur dapat dicermati pada tabel berikut ini :

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Pengelompokan Umur Tahun 1994

U m u r	Laki-laki	Perempuan
0 - 4	205	203
5 - 9	238	247
10 -14	347	336
15 -19	376	367
20 -24	293	257
15 -29	244	237
30 -34	189	198
35 -39	168	161
40 -44	142	154
45 -49	118	137
50 -54	118	131
55 -59	94	101
60 -64	93	85
65 -keatas	236	247
Jumlah	2861	2861

Nampak pada tabel di atas bahwa penduduk usia muda memiliki jumlah yang semakin besar meskipun tidak terlalu menyolok dalam perniadannya. Bila dicermati lebih lanjut perbedaan pertambahan jumlah penduduk usia muda tersebut cenderung semakin kecil. Hal ini memberikan indikasi bahwa ada kemungkinan laju pertumbuhan penduduk pada dasa warsa berikutnya akan semakin kecil pula. Penurunan laju penduduk ini diperkirakan aktifnya para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam memperkenalkan Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera. Hal ini dapat dicermati lewat jumlah akseptor KB berikut ini :

Tabel 3 Jumlah Akseptor KB menurut Kelompok Usia

Usia	Jumlah
Kurang dari 20 tahun	7
20 - 30	383
31 - 42	464
43 ke atas	36
Jumlah	890

Sumber : Monografi Desa.

Dalam tabel tersebut ternyata menggambarkan bahwa peserta KB usia produktif lebih besar jumlahnya daripada yang sudah kurang produktif. hal ini akan memberikan sumbangan pada kemungkinan menurunnya laju pertumbuhan penduduk pada dekade mendatang atas aktifnya para akseptor KB dalam melaksanakan program KB tersebut.

Apabila diamati dari mutasi penduduk pada desa ini akan nampak bahwa jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah perpindahan penduduk. Meskipun jumlah kematian bayi cukup besar namun jumlah pendatang juga sebanding dengan jumlah kematian bayi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4 :

Tabel 4 : Mutasi/Perubahan Penduduk

No.	Status	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Lahir	40	40	80
2.	Mati	19	25	44
3.	Datang	20	24	44
4.	Pindah	18	22	40

Karena adanya pertumbuhan penduduk yang cukup besar maka dalam jangka waktu tertentu desa ini akan mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup padat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dalam *tabel 2* kita melihat adanya pertumbuhan penduduk usia muda yang mengecil, namun pengecilan itu banyak diakibatkan oleh adanya jumlah kematian bayi yang cukup besar. Bila pada saatnya nanti, sanitasi bayi semakin maka akan terjadi ledakan penduduk (*over inhabatin*). Hal ini disebabkan karena adanya perkawinan wanita usia subur yang relatif besar seperti yang digambarkan dalam *tabel 3* diatas. Mengenai kwarganegaraan asing maupun keturunan tidak ada sama sekali di desa ini.

## 2. Keadaan Ekonomi

Berbagai sarana dan prasarana yang tersedia yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi memiliki peran yang cukup besar dalam penyediaan kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat. Tersedianya sarana dan prasarana tersebut juga ikut mendorong berkembangnya *need for achievement* bagi masyarakat dalam berkompetisi mendapatkan penghasilan. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia pada gilirannya ikut mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat desa tersebut dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5 Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk Usia Kerja Pada Tahun 1994

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	
		f	%
1.	Petani	933	54,6
2.	Peternak	35	0,04
3.	Perajin/Industri kecil	174	6,5
4.	Bidan	4	0,2
5.	Mantri Kesehatan	15	0,6
6.	Guru	89	3,3
7.	Pegawai Negeri	139	5,2
8.	Pegawai Swasta	197	7,3
9.	Buruh	243	9,02
10.	Dukun Bayi	5	0,2
11.	Tukang Cukur	13	0,5
12.	Tukang Jahit	38	1,41
13.	Tukang Kayu	39	1,5
14.	Tukang Batu	86	3,2
15.	Angkutan	16	0,6
16.	ABRI	36	1,3
17.	Pensiunan Pegawai Negeri/ABRI	106	3,94
18.	Pedagang	526	19,53
Jumlah		2694	98,94

Sumber Monografi Desa

Dari data ini dapat memberikan gambaran bahwa mata pencaharian penduduk bervariasi. Jenis pekerjaan Tani merupakan mata pencaharian yang paling besara jumlahnya dibanding dengan pekerjaan yang lain (34,6%). Dengan demikian masyarakat tani ini mempunyai ketergantungan dengan alam sangat besar. Maka pengelolaan sumber daya alam (pertanian) sangat diperlukan. Kemudian disusul oleh para pedagang, yang menduduki porsi 19,53%. Dengan demikian mereka ini perlu dibekali manajemen perdagangan yang profesional. Untuk memobilisasi gerak perdagangan diperlukan sarana perekonomian desa dengan suatu pertimbangan bahwa sarana itu (pasar) akan menjadi pendorong berkembangnya usaha dan kegiatan perekonomian pada masyarakat sekelilingnya. Mengenai tersedianya sarana perekonomian desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Sarana Perekonomian Desa Tahun 1994

No.	Sarana Perekonomian Desa	Jumlah
1.	Pasar kota	1 buah (71 kios)
2.	Toko	25 buah
3.	Warung	45 buah
4.	Bank	5 buah
5.	Travel Biro	5 buah
6.	Koperasi Simpan Pinjam	10 buah
7.	Lumbung Desa	5 buah
8.	Badan-badan Kredit	5 buah
9.	Usaha Ekonomi Desa	1 buah

*Sumber : Monografi Desa*

Kegiatan Ekonomi di Desa Lumbungrejo memiliki sarana yang cukup baik dengan tersedianya sebuah pasar dengan jumlah kios yang banyak, begitu juga dengan adanya toko dan warung yang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu jumlah pedagang di desa ini cukup banyak (lihat tabel 5). Hanya saja

tersedianya pasar ini tidak didukung oleh komoditas yang lain. Di desa ini hanya mempunyai hasil industri kerajinan anyam-anyaman yang dikerjakan oleh 43 orang dengan hasil yang tidak tetap. Dengan adanya hal yang seperti ini maka sudah barang tentu membutuhkan pasokan barang-barang dari luar daerah.

Disamping sarana ekonomi tersebut, terdapat pula alat-alat angkutan penduduk seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 7 Alat Transportasi

No.	Jenis Alat Transportasi	Jumlah
1.	Sepeda	504 buah
2.	Andong/Dokar	5 buah
3.	Becak	8 buah
4.	Mobil Dinas	2 buah
5.	Sepeda Motor	372 buah
6.	Mobil Pribadi	28 buah
7.	Truk	4 buah

Dengan melihat tabel ini, maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan transportasi dalam wilayah ini masih terasa kurang mengingat luas daerah dan jumlah penduduk yang cukup besar. Sedangkan transportasi yang sebagian besar diperuntukkan untuk kepentingan umum yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Persoalan ini ada benarnya mengingat nilai produktivitas daerah yang minim sekali. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan/perikanan dan hasil pekarangan penduduk yang bila dirupiahkan adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 8 Produktivitas Daerah

No.	Hasil Produksi	Jumlah
1.	Pertanian	Rp. 1.216.173,00
2.	Perkebunan	Rp. 294.558,00
3.	Pekarangan	Rp. 37.977,00
4.	Peternakan	Rp. 344.624,00
5.	Perikanan	Rp. 3.629,00
6.	Pertambangan	Rp. 143.766,00
Jumlah		Rp. 2.040.915,00

Sumber : Buku Potensi Desa 1994.

Dengan hasil produksi yang semacam ini, maka daerah ini dapat dikategorikan miskin.

### 3. Keadaan Pendidikan.

Pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial dan perubahan kondisi fisik yang lain tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan peran yang dimainkan oleh dunia pendidikan. Tingkat pendidikan yang dicapai oleh setiap warga masyarakat akan menjadi faktor pendorong berkembangnya gagasan baru yang mampu merangsang penemuan baru yang menjadi embrio perubahan dalam pelbagai bidang kehidupan. Tersedia dan terjangkaunya sarana pendidikan dalam berbagai tingkatan akan menjadi penopang utama perkembangan dan perubahan tersebut. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah: Fasilitas/Sarana pendidikan apa saja yang tersedia di wilayah desa ini, sehingga mampu menjadi faktor pendorong terjadinya berbagai macam perkembangan dan perubahan ?. Tabel berikut ini akan menjelaskan tingkat pendidikan penduduk bagi usia lebih dari 5 tahun.

Tabel 9 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 1994

No.	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	694
2.	Tamat SD/Sederajat	1824
3.	Tamat SLTP/Sederajat	1571
4.	Tamat SLTA/Sederajat	1086
5.	Tamat Akademi/Sederajat	74
6.	Tamat Perguruan Tinggi	65
7.	Buta Aksara (10 -55 th.)	449

Sumber : Monografi Desa 1994.

Ternyata dalam tabel ini memberi gambaran bahwa sebagian besar penduduknya hanya tingkat dasar, bahkan yang tidak tamat SD serta buta aksara masih cukup tinggi, meskipun banyak pula yang tamat dari Perguruan Tinggi. Hanya saja perimbangannya cukup jauh.

Kedaaan pendidikan yang seperti itu banyak ditentukan oleh adanya sarana dan prasarana yang tersedia dalam masyarakat. Berikut ini akan digambarkan sarana pendidikan yang tersedia di desa tersebut :

Tabel 10 Sarana Pendidikan yang tersedia tahun 1994

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah		
		bangunan	Ruang	Daya Tampung
1.	TK	7	8	240
2.	SD	4	49	1960
3.	SMP/Sederajat	1	6	240
4.	SLTA/Sederajat	-	-	-
5.	Akademi	-	-	-
6.	Perguruan Tinggi	-	-	-
7.	Pesantren	1	16	421

Sumber : Monografi Desa, 1994.

Dengan mengamati data tersebut, desa ini baru menyediakan tempat pendidikan dasar. Untuk menyongsong pendidikan dasar 9 tahun, desa ini masih kekurangan sarana pendidikan

mengingat jumlah tamatan dari SD 6 tahun cukup besar. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kekurangan tersebut anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi biasanya mereka pergi ke luar daerah, dan ini hanya mungkin dilakukan oleh anak-anak yang mempunyai minat dan biaya yang cukup. Maka anak-anak yang tidak melanjutkan setelah tamat SD 6 tahun cukup banyak, bahkan yang tidak tamat SD pun cukup tinggi. (lihat tabel 9).

Tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah pesantren. Pesantren di desa ini ada 1 buah pesantren yang pendidikannya melulu pendidikan keagamaan dengan kitab-kitab lama dan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantarnya. Sistemnya tidak diatur dengan sistem klasikal, santri-santri hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Kyai mereka.

#### 4. *Keadaan Sosial, Politik dan Budaya.*

Seperti telah kita ketahui, bahwa pola kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung menggantungkan pada alam tanpa disertai peningkatan sumber daya manusia akan membawa manusia ke dalam bentuk fatalis. Seringkali hal ini menimpa sebagian masyarakat agraris. Di dalam penjelasan terdahulu (dalam tabel 5), masyarakat desa Lambungrejo telah mengalami perubahan di dalam tatanan ekonominya, mengingat adanya variasi profesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja pluralitas profesi yang ada itu tidak secara langsung dapat merubah sifat dasar yang dimiliki oleh penduduk desa. Ternyata

mereka masih mempunyai sifat kegotong royongan yang tinggi, peduli terhadap sesama, sensitif terhadap nilai-nilai etika.

Kompleksitas kehidupan sosial masyarakat desa ini belum mencapai tingkat tinggi yang memerlukan penanganan yang luar biasa serius, mengingat jarang terjadi perbuatan-perbuatan asusila meskipun masyarakatnya tergolong miskin. Barangkali yang menciptakan masyarakat sedemikian ini adalah tidak adanya faktor eksternal yang dapat merubah prilaku-prilaku sosial. Di desa ini tidak ada industri, baik yang bersekala menengah maupun besar, tidak ada tempat-tempat hiburan, hotel-hotel maupun tempat penginapan yang biasanya dapat membawa dampak negatif. Sehingga semuanya berjalan secara alamiah, lugu, tanpa kamufase. Keaslian masyarakat desa yang seperti ini sangat memungkinkan sekali untuk dikembangkan potensinya dengan lebih teratur dan terencana sebagai pemegang nilai-nilai luhur bangsa.

Masyarakat desa Lumbungrejo, sebagaimana yang diuraikan di depan, mencerminkan adanya sifat paternalistik sehingga hal itu berpengaruh di bidang politik, sehingga peran seseorang yang ada di depan menjadi panutan mereka. Karena di desa seperti ini, peranan aparat pemerintah menjadi sangat dominan. Sebagaimana yang kita ketahui, afiliasi politik aparat desa banyak ke GOLKAR. Hal ini nampak pada tabel yang akan disajikan berikut ini :

Tabel 11 Afiliasi Politik pada PEMILU 1992

Partai/Golongan	DPRD. Pusat	DPRD. TK. I	DPRD. TK. II
P P P	972	982	961
Golkar	1755	1740	1705
P D I	739	733	759
Suara gugur	151	182	168

Sumber : Data hasil PEMILU Desa 1992.

Dalam tabel ini nampak jelas bahwa Golongan karya masih mendominasi meskipun tidak mutlak. Bila kedua Partai Politik ini berkoalisi, akan terjadi perimbangan. Apalagi bila ke dua Parpol ini dapat memanfaatkan suara-suara pemilih yang gugur. Adanya jumlah suara yang gugur dengan jumlah yang cukup tinggi ini memerlukan pencermatan tersendiri. karena sebagian besar penduduk desa ini beragama Islam (lihat Tabel 12), maka persoalan politik ini tidak lagi dapat di kotak-kotakkan menjadi milik agama tertentu, kecuali pendukung PPP memang masih nampak merupakan partai Islam. Pada tataran selanjutnya, pemeluk agama Islam ini menjadi perebutan ke tiga Partai tersebut. Dalam masyarakat seperti ini sering terjadi keretakan akibat dari afiliasi politik yang berbeda dari pemeluk agama yang sama.

##### 5. Kehidupan Beragama

Dalam negara Pancasila, yang menganut faham Ketuhanan sudah barang tentu sangat menghargai kehidupan beragama bahkan mendudukan agama pada posisi sentral sebagai acuan adanya pembangunan bangsa. Sehingga norma-norma agama seringkali dijadikan dasar kebijakan pemerintah. Biasanya kelompok mayoritas mempunyai pengaruh yang besar dalam pranata-pranata pemerintahan, baik yang memegang pemerintahan, pendukung dan

pelaksana kebijakan dan lain-lain.

Dalam tabel berikut ini akan dijelaskan secara nyata secara kuantitatif tentang pemeluk masing-masing agama yang ada di Desa tersebut.

Tabel 12 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Pada Tahun 1994

No.	Agama / Kepercayaan	Jumlah
1.	Islam	5.541 orang
2.	Kristen	47 orang
3.	Katolik	122 orang
4.	Budha	6 orang
5.	Hindu	-
6.	Kepercayaan	-
Jumlah		5.716 orang

Sumber : Monografi Desa tahun 1994.

Dalam tabel ini jelas bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas. Apakah jumlah mayoritas ini diimbangi dengan sarana-sarana yang lain ? Seperti tempat ibadah atau majlis-majlis ta'lim ? Hal itu dapat dijelaskan lewat gambaran tabel berikut ini :

Tabel 13 Jumlah Tempat Peribadatan Pada Tahun 1994

No.	Jenis	Jumlah	Daya Tampung
1.	Masjid	7	3.500 orang
2.	Musholla/Langgar	19	1.600 orang
3.	Gereja/Kapel	2	200 orang
4.	Wihara	-	-
5.	Pura	-	-

Sumber : Monografi Desa Tahun 1994.

Dengan tersedianya sarana ibadah yang cukup banyak dan dapat menampung sejumlah besar jamaah, maka tempat ibadah ini sudah mencukupi. Ummat Islam dalam desa ini menjadi mayoritas

itu didukung pula dengan adanya majlis ta'lim yang jumlahnya cukup banyak. Sistem yang digunakan majlis ini adalah pengajian dari rumah-ke rumah dipimpin oleh seorang ustadz/kiyai. Disamping itu di desa ini ada *Pusat Informasi Pesantren* yang beranggotakan 110 orang. Dari sini diharapkan adanya peningkatan kualitas ummat.

## B. Desa Mardiko Rejo

### 1. Keadaan Demografi

Desa Mardikorejo memiliki karakteristik wilayah, kependudukan dan ketenagakerjaan yang berbeda meskipun ada beberapa kecenderungan yang sama dengan desa Lumbungrejo. Pertama, akan ditampilkan gambaran mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang dapat diamati pada tabel berikut :

Tabel 14. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 1994.

Jenis kelamin	f
Laki-laki	2607
Perempuan	2619
Jumlah	5226

*Sumber : Potensi Desa 1994*

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa tidak banyak perbedaan yang berarti antara komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Mardikorejo. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang. Sementara itu gambaran penduduk di lihat dari kelompok usia menunjukkan pada besarnya jumlah penduduk usia muda dan semakin kecilnya jumlah penduduk usia lanjut. Komposisi penduduk menurut umur dapat dicermati pada tabel berikut :

Tabel 15 Jumlah Penduduk menurut Pengelompokan umur tahun 1994.

Kelompok umur	Jenis kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
0 - 4 th	143	95
5 - 9 th	126	127
10 -14 th	130	135
15 -19 th	232	223
20 -24 th	270	250
25 -29 th	295	292
30 -34 th	265	282
35 -39 th	325	322
40 -44 th	212	213
45 -49 th	171	179
50 -54 th	112	173
55 -59 th	137	142
60 -64 th	60	56
65 -keatas	29	30
Jumlah	2607	2619

*Sumber : Potensi Desa Mardikorejo 1994*

Nampak pada tabel di atas bahwa penduduk usia muda memiliki jumlah yang semakin besar, sehingga apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan menyerupai piramid. Namun demikian jika dicermati lebih lanjut, perbedaan pertambahan jumlah penduduk usia muda tersebut semakin kecil, bahkan ada kecenderungan bahwa jumlah penduduk usia muda semakin menurun. Hal ini memberikan indikasi bahwa ada kemungkinan laju pertumbuhan penduduk pada dasa warsa berikutnya akan semakin kecil pula. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini merupakan kerja keras para petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam memperkenalkan program Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera, dengan penggunaan alat kontrasepsi baik yang bersifat sementara ataupun mantap. Hal ini dapat dicermati lewat jumlah akseptor KB yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 16 Jumlah Akseptor KB menurut jenis Kontrasepsi.

Jenis kontrasepsi	
Pil	35
IUD	315
Kondom	37
Suntikan	78
MOW	13
MOP	3
Lainnya	98
Jumlah	569

*Sumber : Buku Potensi Desa 1994*

Dari tabel di atas dapat dilihat IUD dan suntikan merupakan jenis kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor, bahkan jenis MOW/tubektomi dan MOP/vasektomi sebagai jenis kontrasepsi mantap, juga didapati. Apabila dilihat dari jumlah pasangan usia subur (PUS) yang berjumlah 600 orang ada 569 yang menjadi peserta KB Aktif (95,00%), sedang untuk DIY dari PUS yang ada hanya 37% yang menjadi akseptor KB. Dari jumlah akseptor aktif tersebut ada 13 akseptor yang telah memperoleh piagam sebagai peserta KB lestari dan 2 akseptor yang menerima Bea siswa Supersemar, gambaran ini memberikan sumbangan pada kemungkinan menurunnya laju pertumbuhan penduduk pada dekade mendatang atas aktifnya para akseptor dalam melaksanakan program KB.

Apabila diamati dari mutasi penduduk di desa Mardikorejo dan jumlah kelahiran sangat kecil, pada tahun 1994 terdapat 60 kelahiran dari 600 pasangan usia subur, dan 15 orang yang datang/pindah ke Desa Mardikorejo, sedang yang keluar dari desa tersebut ada 25 orang. Karena itu tidak diragukan lagi bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Desa Mardikorejo sangat rendah.

## 2. Keadaan Ekonomi

Berbagai sarana dan prasarana yang tersedia dan berkaitan dengan kehidupan ekonomi memiliki peran yang cukup besar dalam penyediaan kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat. Tersedianya sarana dan prasarana tersebut juga ikut mendorong berkembangnya *need for achievement* bagi masyarakat dalam berkompetisi mendapatkan penghasilan. Kondisi sarana dan prasarana pada gilirannya ikut mempengaruhi jenis pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat di desa Mardikorejo dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 17 Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk Usia Kerja Pada tahun 1994.

	Jenis Pekerjaan	f
1.	Petani Pemilik Tanah	924
2.	Petani Penggarap	465
3.	Buruh Tani	235
4.	Perkebunan	15
5.	Pengraji tangan	148
6.	Peternak	61
7.	Industri kecil	150
8.	Bidan	2
9.	Mantri Kesehatan	7
10.	Guru	76
11.	Pegawai Negeri Sipil	119
12.	Pegawai Swasta	68
13.	Buruh	116
14.	Tukang Kayu & batu	143
15.	ABRI	34
16.	Angkutan	6
17.	Pensiunan	17
18.	Pedagang	18
19.	Lain-lain	50
Jumlah		2653

Sumber : Potensi Desa 1994

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa mata pencaharian penduduk Desa Mardikorejo sangatlah bervariasi jenis pekerjaan petani baik petani pemilik tanah, petani penggarap maupun buruh tani merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan penduduk. Besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian *hampir mencapai ± 60% lebih* menunjukkan bahwa penduduk Desa Mardikorejo sangat tergantung pada sektor pertanian, baik pertanian padi, salak pondoh maupun sayur-sayuran.

Sektor pertanian di Desa Mardikorejo didukung dengan luas lahan 306 Ha dari luas wilayah 613 Ha. Luas tersebut menduduki jumlah 50% adalah pertanian padi dan ternyata mencapai jumlah terbesar yaitu ada 290 Ha. Pertanian sawah ini didukung dengan sarana 13 dam desa, 2 dam teknis, 15 irigasi dan satu talang. Sedang sisanya 16 Ha merupakan tanah ladang dan tegalan yang banyak ditanami salak pondoh, polowijo dan buah-buahan.

Jika dilihat dari perbandingan luas areal pertanian ± 306 Ha dengan jumlah petani pemilik tanah yang berjumlah 924, memberi gambaran betapa sempitnya lahan yang mereka miliki yaitu rata-rata setiap orang memiliki tanah sawah ± 0,3 Ha. Adapun petani penggarap ada 465 orang dan buruh tani 235 orang. Potensi ini mendorong masyarakat maupun pemerintah desa untuk mengembangkan usaha pertanian melalui usaha intensifikasi, bukan ekstensifikasi.

Dinamika kehidupan sosial ekonomi dan kemasyarakatan di desa Mardikorejo tidak dapat dilepaskan dari fasilitas dan

sarana prasarana yang tersedia. Fasilitas dan prasarana pendukung tersebut adalah fasilitas fisik, pasar, toko, warung dan prasarana perekonomian lainnya, seperti industri kecil atau industri rumah tangga.

Tersedianya sarana fisik yang mendukung dinamika perekonomian penduduk sekitarnya, khususnya dalam bidang perdagangan menjadi pendorong berkembangnya usaha dan kegiatan perekonomian masyarakat sekelilingnya. Adapun sarana perekonomian yang ada di Desa Mardikorejo terlihat pada berikut.

Tabel 18 Jumlah Sarana Perekonomian Desa Mardikorejo tahun 1994.

Sarana Perekonomian	f
Kios/warung	25
Toko	16
Lumbung desa	11
Penggilingan Padi	1

Sumber : *Buku Potensi Desa 1994*

Kegiatan perdagangan di Desa Mardikorejo relatif sangat kurang dilakukan penduduk bila dibandingkan dengan sektor pertanian. Sedangkan kegiatan di kios, toko dan warung hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama kebutuhan rumah tangga.

Disamping sarana perekonomian di atas, sejumlah industri rumah tangga dan usaha angkutan kota dilakukan oleh warga desa setempat. Tabel di bawah ini menginformasikan jenis dan jumlah industri yang ada di Desa Mardikorejo.

Tabel 19 Jumlah Sarana Perekonomian yang lain.

No.	Sarana Perekonomian lain	Jumlah unit
1.	Anyam anyaman	236
2.	Mebel dan kayu	1
3.	Angkutan / truk	1
4.	Andong	3

Sumber : *Potensi Desa 1994*

Adanya usaha sektor industri ini menjadi pendorong perkembangan ekonomi desa dan merupakan kesempatan kerja bagi penduduk sehingga mengurangi angka pengangguran.

Usaha dibidang peternakan juga banyak dilakukan oleh penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani. Usaha ini dimaksudkan untuk menambah penghasilan mereka, yaitu dengan memelihara kerbau, ayam dan lain-lain.

Kerbau dan sapi disamping sebagai simpanan dapat membantu dalam mengerjakan sawah untuk membajak. Jenis ternak yang terdapat di Desa Mardikorejo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20 Jenis ternak yang ada di Desa Mardikorejo.

No.	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Kerbau	158
2.	Sapi	224
3.	Kambing	712
4.	Kuda	7
5.	Ayam buras	2000
6.	Itik	2100
7.	Ayam potong	1500
8.	Ayam Petelur	2200

Sumber : *Potensi Desa 1994*

Gambaran yang diperoleh dari tabel di atas adalah adanya peningkatan usaha dan penghasilan masyarakat yang sebagian besar petani. Dengan adanya usaha tambahan tersebut

akan menambah kesejahteraan penduduk desa Mardikorejo.

Perkembangan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang tersedia. Sarana dan prasarana ini akan mempengaruhi mobilitas dan respon masyarakat dalam menghadapi perkembangan/kemajuan yang sedang berlangsung. Tabel berikut memperlihatkan sarana dan transportasi yang ada di Desa Mardikorejo.

Tabel 21 Jumlah sarana Komunikasi Transportasi

No.	Sarana Transportasi Komunikasi	Jumlah Satuan
1.	Radio	240
2.	Televisi	170
3.	Sepeda	914
4.	Sepeda motor	332
5.	Mobil	19
6.	Dokar	3
7.	Jembatan	22
8.	Jalan aspal	5 km
9.	Jalan batu	7 km
10.	Jalan tanah	15 km

Sumber : *Potensi Desa 1994.*

Tabel di atas memperlihatkan banyaknya sarana transportasi dan komunikasi di desa yang dapat mempermudah mobilitas masyarakat. Disamping itu didukung pula adanya sarana jalan yang cukup memadai untuk melakukan mobilitas ke berbagai daerah lainnya. Terutama Desa Mardikorejo tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Yogyakarta dengan Semarang.

Dengan adanya sarana jalan dan kemudahan transportasi ini mendukung kemudahan bagi warga desa untuk bekerja keluar desa seperti ke Yogyakarta ke Sleman, Muntilan dan lain-lain.

### 3. Keadaan Politik

Desa Mardikorejo terdiri dari 17 Pedukuhan, 32 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tetangga (RT) yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Dalam melayani penduduk yang berjumlah 5226 orang. Kepala Desa dibantu oleh seorang sekretaris desa, lima orang kepala urusan dan tujuhbelas kepala desa yang tersebar di 17 padukuhan.

Dilihat dari prestasi bidang pembangunan desa ini tergolong kategori maju, karena telah mencapai desa Swasembada. Tentunya prestasi ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri dalam meraih tingkat perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakatnya.

Pola kepemimpinan yang berkembang di masyarakat sangat dipengaruhi kehidupan santri, dimana hampir semua aspek kehidupan banyak diwarnai oleh nasehat (fatwa) dan pengaruh dari pemuka agama, ulama Imam Masjid (Kyai) serta kehidupan semacam ini banyak dilakukan oleh kalangan Nahdliyin. Oleh sebab itu kyai ditempatkan sebagai sentral dalam menangani masalah-masalah kehidupan. Sementara itu pemimpin formal dalam pemerintahan sering hanya sebagai tempat untuk berurusan atau berkonsultasi yang berkaitan dengan administrasi (Pemerintahan).

Afiliasi dan aspirasi masyarakat hampir di semua pedukuhan nampak didominasi oleh Golongan Karya, tidak memandang mereka dari kalangan Nahdliyin maupun Muhammadiyah. Tabel berikut memberikan gambaran perolehan suara pada hasil pemilu pada tahun 1992 yang lalu.

Tabel 22 Hasil Pemungutan Suara Tahun 1992  
di Desa Mardikorejo.

No.	Nama Organisasi Politik	Hasil	%
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	158	
2.	Golongan Karya (Golkar)	224	
3.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	712	
		2700	

Sumber : *Potensi Desa 1994*.

Hasil Pemungutan Suara di Desa Mardikorejo aspirasi suara masyarakat disalurkan pada Golongan Karya yang pendukungnya hampir seluruh warga desa. Tampaknya masalah penentuan pilihan dalam pemilihan umum tidak semata-mata didasarkan pada fatwa kyai saja tetapi lebih dilihat pada kenyataan yang memberikan harapan-harapan dalam usaha memperoleh kemudahan.

#### 4. Keadaan Pendidikan

Pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial politik dan perubahan kondisi fisik yang lain tidak dapat dilepaskan dengan pendidikan. Maka tingkat pendidikan yang dicapai oleh setiap warga masyarakat sangat menjadi faktor pendorong berkembangnya, gagasan baru yang mampu merangsang perubahan dalam pelbagai bidang kehidupan. Tabel berikut menggambarkan tingkat pendidikan penduduk di Desa Mardikorejo.

Tabel 23. Jumlah penduduk menurut pendidikan bagi usia lebih dari 5 tahun.

No.	Tingkat Pendidikan	f.
1.	Belum Sekolah	93
2.	Tidak tamat SD	3677
3.	Tamat SD	831
4.	Tamat SLTP	282
5.	Tamat SLTA	274
6.	Tamat Akademik	28
7.	Tamat Perguruan Tinggi	21
8.	Buta Aksara	214
Jumlah		5540

Sumber : *Potensi Desa 1993/1994*

Tingkat pendidikan sebagian dasar penduduk Desa Mardikorejo tidak tamat SD dan yang yang SLTP ke atas kurang dari 12 % (605) dari jumlah penduduk. Ini artinya kepedulian mereka terhadap pendidikan tergolong masih rendah.

Fasilitas pendidikan yang tersedia di desa memiliki peran yang cukup besar dalam pengembangan pendidikan masyarakat baik yang ke sekolah umum maupun Agama. Fasilitas pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Jumlah Sarana Pendidikan yang tersedia tahun 1994.

No.	Tingkat Pendidikan	f.
1.	TK	2
2.	SD	4
3.	SLTP	1
4.	SLTA	2
5.	TPA	3

Sumber : *Potensi Desa 1994*

Perkembangan pendidikan umum nampaknya telah merambah di kalangan Nahdliyin. Hal ini tercermin pada berdirinya SMK NU. Tersedianya sarana pendidikan ini nampaknya

menjadi pendorong utama untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Dari sekian banyak sarana pendidikan yang ada hanya ada dua yang dikelola oleh swasta, yakni : satu SD Muhammadiyah dan SMKK NU.

##### 5. *Kehidupan Beragama*

Penduduk Desa Mardikorejo mayoritas beragama Islam dari jumlah penduduk 5226, yang beragama Islam 5158 (99 %) dan 68 orang beragama Kristen Katolik yang semuanya warga negara Indonesia.

Dari pemeluk Islam yang berjumlah 5158 mereka berafiliasi pada dua organisasi keagamaan yang berbeda yakni NU dan Muhammadiyah, yang mempunyai kegiatannya mengelola pendidikan umum. Disamping itu ada kegiatan Majelis taklim yang dilakukan secara rutin di tiap-tiap padukuhan yang tergabung dalam wadah tahlilan, yasinan (yang banyak dilakukan kelompok Nahdliyin). Kegiatan lain yaitu kajian Islam dengan model diskusi, dimana tiap-tiap peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada penceramah mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi.

Kegiatan keagamaan lainnya adalah usaha pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, yang dikelola melalui TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang diikuti oleh anak-anak usia sekolah dasar.

Kelompok pengajian, kelompok tahlilan dan berbagai kegiatan baik kalangan Nahdliyin maupun Muhammadiyah bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa serta kemampuan moral untuk menghadapi perkembangan jaman dan

tuntutan keadaan. Untuk mendukung kegiatan tersebut telah tersebut sejumlah tempat ibadah yang dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan. Tabel berikut memberi informasi jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Mardikorejo.

Tabel 25. Jumlah sarana Ibadah di Desa Mardikorejo

Tempat Ibadah	f
Masjid	10
Musholla	15

*Sumber : Potensi Desa 1993/1994*

Perhatian masyarakat dalam menyediakan tempat ibadah, hampir menyeluruh di tiap-tiap dusun terdapat masjid dari 17 dusun yang ada tersedia 7 masjid, dengan demikian dusun yang tidak tersedia masjid, untuk keperluan shalat Jum'at bergabung dengan dusun terdekat yang ada masjidnya. Disamping masjid didapati pula 15 musholla (terutama dusun yang belum ada masjid) yang biasanya untuk shalat jamaah yang lima waktu dan sekaligus sebagai tempat pengajian untuk meningkatkan pengetahuan agama jamaah.

BAB III  
KKN IAIN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT  
DESA

A. Program KKN IAIN Sunan Kalijaga .

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah mulai sejak tahun akademik 1976/1977. Sejalan dengan Perguruan Tinggi Negeri yang ada. pelaksanaan program KKN ini masih bersifat ekstra kurikuler. Kemudian pelaksanaan tersebut berubah dari ekstra kurikuler menjadi intra kurikuler berdasarkan SK Rektor Nomor : 51 Tahun 1980.

Mengikuti perkembangan ide diselenggarakan program KKN, baik dari hasil PTM (Perguruan Tenaga Mahasiswa), TKS Butsi maupun Bimbingan Masyarakat atau BIMAS, pada dasarnya kegiatan tersebut menunjukkan arti dan peranan mahasiswa dalam pembangunan nasional dengan wadah pengabdian pada masyarakat. Ini berarti rumusan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang digariskan oleh Perguruan Tinggi merupakan realisasi perpaduan ketiga darma, yaitu : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Melalui KKN mahasiswa harus mampu mengaplikasikan teori dan ketrampilan untuk dipakai dasar pemikiran dalam pengabdianya kepada masyarakat desa ke arah terbinanya masyarakat dinamis-mandiri yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan program pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (masyarakat desa).

Melihat dasar pemikiran di atas, maka pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga di lokasi desa tidak hanya menerapkan disiplin ilmu yang dikembangkan di IAIN saja tetapi interdisipliner, yaitu penyempurnaan antara disiplin ilmu agama dengan disiplin lain. Disiplin ilmu lain yang dimaksud terwujud dalam program fisik, lingkungan hidup, administrasi pemerintahan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pengembangan sosial-budaya, yang sama sekali berada di luar disiplin ilmu yang ada di IAIN.

KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang pelaksanaannya oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) dan Mahasiswa adalah pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan agama Islam kepada masyarakat desa. Pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengabdikan dalam rangka mencapai misi IAIN, yaitu disamping harus mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam juga seharusnya dapat menerapkan dan memanfaatkan ilmu agama Islam sesuai dengan tuntutan kehidupan sosial yang terus berkembang. Pengabdian masyarakat dalam bidang agama atau ilmu agama yang diprogramkan KKN IAIN merupakan kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan agama dan penerapan ajaran agama dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Sehubungan dengan pola pelaksanaan yang telah diprogramkan, kegiatan KKN IAIN Sunan Kalijaga diprogramkan dalam bidang kegiatan meliputi :

1. Bidang agama, merupakan bidang wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta KKN;
2. Bidang Prasarana fisik dan Lingkungan Hidup;
3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa; dan
4. Bidang Pendidikan, Sosial Budaya, Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), ketiga bidang ini merupakan bidang pilihan dimana mahasiswa peserta KKN dapat memilih sebagai program individual sekaligus untuk kolektif.

Secara konseptual bidang-bidang yang diprogramkan KKN IAIN Sunan Kalijaga mempunyai target dan tujuan :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan pembangunan baik yang bersifat material maupun mental;
2. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam memecahkan problematika yang mereka hadapi;
3. Penghayatan dan pengamalan keagamaan masyarakat akan semakin baik, sehingga masyarakat insyaf akan pentingnya peran agama dalam setiap dinamika kehidupan;
4. Mengembangkan harkat dan martabat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam suasana kehidupan yang agamis, menuju masyarakat adil makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Rumusan di atas merupakan gambaran ideal program KKN IAIN Sunan Kalijaga, sehingga kehadiran KKN di desa akan mendorong dan mengembangkan masyarakat desa untuk memecahkan problem yang selama ini melilitnya, yaitu kemiskinan, keterbelakangan dan ketidaktahuan. Dalam menggarap masyarakat desa

yang demikian keadaannya, program KKN IAIN Sunan Kalijaga diprogramkan untuk dapat membantu mengatasi dan memecahkan persoalan-persoalan desa, terutama masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan nasional.

Untuk menterjemahkan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan KKN disusunlah program kegiatan dalam berbagai bidang, dengan terlebih dahulu mencoba menidentifikasi masalah-masalah yang berkembang di masing-masing lokasi. Oleh karena lokasi KKN IAIN cenderung memilih daerah-daerah/desa-desa yang miskin, terisolir dan belum maju, maka permasalahan-permasalahan yang muncul memang kompleks dan dengan tantangan yang berat itu, pelaksanaannya semakin merangsang. Dengan mengambil lokasi beberapa wilayah dalam kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah, dirangkum identifikasi masalah yang umumnya hampir sejenis, sebagai berikut :

#### 1. Identifikasi Masalah

##### a) *Bidang Agama*

- 1) Masih ada masjid yang belum dilengkapi dengan :  
garis-garis shof yang benat, kaligrafi, sound system, tikar, rukuh, mimbar, penerangan, kepengurusan/takmir, papan nama, meja untuk ngaji, dan lain-lain.
- 2) Masih ada tanah-tanah wakaf baik untuk tempat ibadah, madrasah atau lainnya belum memiliki akte wakaf.
- 3) Kegiatan penyuluhan keagamaan belum efektif.

- 4) Kegiatan remaja Islam sering mubazir/kurang terarah.
- 5) Baca tulis Al Qur'an belum memasyarakat.
- 6) Masyarakat belum sepenuhnya menguasai cara-cara merawat jenazah menurut tuntunan Islam.
- 7) Masih ada pedusunan yang belum mendirikan TPA/TKA.
- 8) Pelaksanaan Zakat belum sepenuhnya difahami oleh masyarakat.
- 9) Masyarakat masih miskin akan tenaga khatib, da'i, dan guru ngaji.
- 10) Masyarakat belum banyak memahami makna kerukunan hidup beragama.

b. *Bidang Prasarana Fisik Lingkungan Hidup*

- 1) Bangunan, gedung, kantor yang dibutuhkan masyarakat belum ada.
- 2) Bangunan, gedung, kantor yang ada dirasakan sudah kurang memadai.
- 3) Rumah-rumah penduduk, kantor, sekolahan dan lainnya banyak yang belum memiliki sarana MCK.
- 4) Sarana komunikasi dan transportasi belum lancar.
- 5) Sarana pertanian, dam, selokan yang diperlukan belum tersedia.
- 6) Berbagai bangunan gapura, tugu yang memperindah desa/dusun belum ada.
- 7) Penghijauan di pinggir jalan, hutan ataupun tanah-tanah milik masyarakat belum dilakukan.
- 8) Masyarakat kurang memahami cara membuat rumah yang berlingkungan sehat.

- 9) Sanitasi dan sumber air bersih belum tertangani.
- 10) Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan tiap jengkal tanah pekarangannya agar produktif.

c. *Bidang Administrasi Pemerintahan*

- 1) Masih ada kegiatan pemerintahan khususnya dan kegiatan pembangunan pada umumnya belum direkam dalam suatu tabel atau statistik yang memadai.
- 2) Desa, dusun belum memiliki peta wilayah, atau peta wilayah yang ada sudah tidak memadai.
- 3) Berbagai macam papan nama, papan penunjuk, struktur organisasi, sepuluh program PKK dan papan-papan nama lain yang diperlukan belum tersedia.
- 4) Desa, dusun belum memiliki papan monografi.
- 5) Data-data desa, dusun dan lembaga-lembaga lain yang ada belum terarsipkan.
- 6) Tata ruang kantor desa, dusun dan lembaga-lembaga lain belum tertata secara baik.
- 7) Desa, dusun dan lembaga-lembaga lain belum mendapat penataran tertib administrasi.
- 8) Buku-buku administrasi baik di kantor desa maupun dusun belum sesuai dengan data administrasi yang baik.
- 9) Belum terdapat data kependudukan baik di desa maupun di dusun.
- 10) Administrasi Karang Taruna dan Organisasi Kepemudaan lainnya belum memadai.

d. *Bidang Pendidikan, Sosial Budaya, Kesehatan dan Keluarga Berencana*

- 1) Banyak pemuda putus sekolah di pedesaan yang memerlukan pembinaan, pengarahan dan pengembangan daya mereka.
- 2) Banyak wanita pedesaan yang memerlukan peningkatan di bidang usaha ekonomis, produktif (kerajinan, sulaman, industri kecil, teknologi tepat guna pedesaan dan lain-lain).
- 3) Pendidikan non formal belum banyak dilakukan.
- 4) sistem pendidikan pembangunan belum banyak dimasyarakatkan.
- 5) Umat Islam masih miskin kader-kader penerus.
- 6) Penyuluhan sekitar taman gizi, apotik hidup, kader sehat, dan lain-lain belum aktif.
- 7) Penyuluhan NKKBS belum digalakkan.
- 8) Belum termanfaatkannya Puskesmas, obat-obatan dan obat tradisional secara baik.
- 9) Pedesaan belum diramaikan oleh pokjar anak-anak SD, SMP, SMTA dan lain-lain.
- 10) Masyarakat belum menyadari arti penting Undang-Undang Perkawinan dan Akte Kelahiran.

2. Program Kegiatan di Berbagai Bidang.

Program kegiatan pada umumnya disesuaikan dengan masalah/kebutuhan masyarakat mulai dari masalah-masalah yang bersifat praktid sampai program untuk merubah pola tata pikir masyarakat untuk menerima perubahan menuju pembaharuan dan

kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Program-program banyak diurai dalam banyak butir (Sumber : *Laporan Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Angkatan 25, 1993* : 54-57) :

1. Bidang Agama

- 01) Pengajian anak-anak/TPA
- 02) Pengajian Remaja
- 03) Pengajian Ibu-Ibu
- 04) Pengajian Bapak-Bapak
- 05) Pengajian Umum
- 06) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
- 07) Kultum (Kuliah Tujuh Menit)
- 08) Khutbah Jum'at
- 09) Kursus Perawatan Jenazah
- 10) Kursus Baca Tulis Al-Qur'an
- 11) Pengadaan Al-Qur'an/Tarjamah
- 12) Pengadaan Juz Amma/Iqra
- 13) Pengadaan Buku-buku Agama
- 14) Pengadaan Rukuh/Mukena
- 15) Pengadaan Tikar Masjid /Mushola
- 16) Pengadaan Lampu Masjid /Mushola
- 17) Pengadaan Mustaka
- 18) Pengadaan Kotak Amal
- 19) Pengadaan Pengeras Suara
- 20) Pengadaan alat Kebersihan
- 21) Pengadaan Jam Dinding
- 22) Pengadaan Jadwal Waktu Shalat
- 23) Pengadaan Jadwal Khatib
- 24) Pengadaan Papan Tulis

- 25) Pengadaan Meja untuk Mengaji
- 26) Pengadaan Kaligrafi
- 27) Pengadaan Rak/almari Buku
- 28) Pengadaan Mimbar
- 29) Pengadaan Kitab Kuning
- 30) Pengadaan Pengadaan Sajadah
- 31) Pengadaan Hewan Qurban
- 32) Pelatihan Uztad TKA/TPA
- 33) Pelatihan Khatib
- 34) Pelatihan Pengelola TKA/TPA
- 35) Bimbingan Tahlil
- 36) Bimbingan Membaca Barzanji
- 37) Membentuk Takmir Masjid

2. Bidang Prasarana Fisik dan Lingkungan Hidup

- 01) Pembangunan Masjid Baru
- 02) Perbaikan/Penyelesaian Masjid
- 03) Pembangunan Musholla Baru
- 04) Perbaikan/Penyelesaian Musholla
- 05) Pembangunan Tempat Wudlu
- 06) Perbaikan/Penyelesaian Tempat Wudlu
- 07) Pembangunan MCK Baru
- 08) Perbaikan/Penyelesaian MCK
- 09) Pembangunan Gapura Baru
- 10) Perbaikan/Penyelesaian Gapura
- 11) Pembangunan Pos Kamling Baru
- 12) Perbaikan/Penyelesaian Pos Kamling
- 13) Pembangunan Jembatan Baru
- 14) Perbaikan/Penyelesaian Jembatan
- 15) Pembuatan Kotak/Bak/Lubang Sampah

- 16) Pembuatan Taman Hias
- 17) Pembuatan Jalan Baru
- 18) Perbaikan/Pengerasan Jalan/Gang
- 19) Pembuatan Saluran Irigasi
- 20) Perbaikan Saluran Irigasi
- 21) Pembuatan/Perbaikan Dam Air
- 22) Pembuatan Saluran Air Bersih
- 23) Pembuatan Saluran Air Limbah
- 24) Pembuatan/Perbaikan Sumur
- 25) Pembangunan Tanggul Jalan
- 26) Pembuatan/Penataan Pagar
- 27) Penerangan Jalan
- 28) Penanaman Bibit Pohon
- 29) Pengecetan/Pengapuran Masjid/Musholla
- 30) Pengecetan Gapura, Kantor Desa dll.
- 31) Pembuatan Papan Petunjuk>Nama Jalan
- 32) Pembuatan Papan Nama Masjid, Musholla, Kantor
- 33) Pembuatan Tugu Batas Desa/Dusun
- 34) Pembuatan Lapangan Volley
- 35) Pembuatan Lapangan Badminton
- 36) Pemugaran ruma Miskin
- 37) Pembuatan Shof Sholat
- 38) Pembuatan Lapangan Tennis Meja
- 39) Pembuatan Kolam Ikan
- 40) Pembuatan Kotak Surat

### 3. Bidang Administrasi Pemerintahan

- 01) Pembuatan Statistik
- 02) Pembuatan Grafik
- 03) Pembuatan Monografi
- 04) Pembuat Peta wilayah
- 05) Pembuatan Buku Administrasi Desa/Dusun
- 06) Mengisi Buku Data Desa
- 07) Mengisi Buku Data Dusun
- 08) Pembuatan Buku PKK dan Dasa Wisma
- 09) Pembuatan Buku Karang Taruna
- 10) Penataan Ruang Kantor Desa
- 11) Penertiban Administrasi Desa/Dusun
- 12) Pembuatan Papan Kehadiran Perangkat Desa
- 13) Pembuatan Papan 10 Program PKK
- 14) Pembuatan Papan Nama Perangkat Desa
- 15) Pembuatan Papan Trilogi Pembangunan
- 16) Pembuatan Struktur Keorganisasian LKMD, PKK, Karang Tarunan, dll.
- 17) Penataran Tertib Administrasi
- 18) Pembuatan Papan Nama Posyandu
- 19) Pembuatan Data Didinig PKK dan Dasa Wisma
- 20) Pembuatan Papan Informasi

### 4. Bidang Pendidikan, sosial Budaya, Kesehatan dan KB

- 01) Pendidikan Pengajaran
  - a. Bahasa Indonesia
  - b. Bahasa Inggris
  - c. Bahasa Arab
  - d. Matematika
  - e. I P A

- f. I P S
- g. Bahasa Daerah

02) Kursus

- a. Menjahit
- b. Mengetik
- c. Pertukangan
- d. Perbengkelan
- e. Masak Memasak
- f. Kecantikan
- g. Merangkai Bunga
- h. Kerajinan (Ukir/Lukis)
- i. Sulam/Anyaman
- j. Dekorasi
- k. Sablon
- l. Industri Kecil

03) Penyuluhan

- a. Perkawinan
- b. Perpajakan
- c. Kesadaran Hukum
- d. P4
- e. KB
- f. Hidup Sehat
- g. Peternakan
- h. Pertanian
- i. Perikanan
- j. Penghijauan
- k. Intensifikasi Tanah Pekarangan

04) Latihan/Pembinaan

- a. Kader Dakwah/Dai Muda
- b. Seni Baca Al-Qur'an
- c. Kepramukaan
- d. Keolahragaan
  - 1) Sepakbola
  - 2) Badminton
  - 3) Tenis Meja
  - 4) Bela Diri
  - 5) Bola volley
- e. Kesenian
  - 1) Kasidah
  - 2) Drama/Teater
  - 3) Tari
  - 4) Folksong
  - 5) Karawitan
  - 6) Puisi/Karaoke
- f. Karang Taruna
- g. PKK dan Dasa Wisma
- h. Leadership/Kepemimpinan
- i. Latihan Sinoman

05) Kegiatan sosial Budaya

- a. Pasar Murah
- b. Pemutaran Film
- c. Pertunjukkan Kesenian
- d. Mengadakan MTQ
- e. Cepat Tepat P-4 dan Agama

- f. Pertandingan/Lomba
  - 1) Olah Raga
  - 2) Kesenian
  - 3) Ketrampilan
- g. Lomba Busana Muslim

06) Pengadaan

- a. Alat Peraga Mengajar
- b. Alat Olah Raga
  - 1) Bola Kakiukaan
  - 2) Bola Volley
  - 3) Net
  - 4) Raket
  - 5) Bed Tennis Meja
  - 6) Catur
- c. Alat Kesenian
  - 1) Rebana
  - 2) Seruling
  - 3) Harmonika
  - 4) Gitar
  - 5) Cassete Music
- d. Pengadaan Parkeb. Produktif.

3. Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)

- 1) Relevansi KKN dengan Pembangunan Masyarakat Desa.  
Kebijakan pembangunan masyarakat desa di Indonesia di dukung oleh kemauan politik yang sangat kuat, sehingga perwujudan kebijakan PMD bukan sekedar aplikasi akade- mik berdasarkan kajian dan studi banding, namun karena

dijiwai dan disemangati untuk dari waktu ke waktu secara konsisten berusaha membebaskan masyarakat dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan, serta menawarkan masa depan yang lebih sejahtera.

Dari waktu ke waktu, rasanya, operasionalisasi kebijakan PMD harus selalu mempertimbangkan :

- a. Tetap berpihak dan mendasarkan diri dari pada kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Mengembangkan inspirasi, aspirasi dan dan partisipasi masyarakat.
- c. Menggerakkan dan menghidupkan aktivitas ekonomi rakyat.
- d. Pengorganisasian dan pelembagaan, yang dikelola dan menjadi tanggungjawab masyarakat sendiri.
- e. Bantuan, bimbingan dan pembinaan pemerintah yang merupakan tanggungjawab dari semua instansi melalui koordinasi dan keterpaduan.
- f. Pengembangan teknologi tepat guna, dengan mengutamakan jenis teknologi padat karya yang produktif dan adaptif, agar mampu mengikuti perkembangan modernisasi teknologi.

Sebagai contoh betapa KKN memiliki relevansi yang sangat erat dengan pembangunan masyarakat desa adalah usaha untuk semakin memikirkan dan mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap teknologi tepat guna yang tampaknya menjadi semakin penting, karena pengaruh globalisasi kegiatan perekonomian, sehingga masyarakat desa senantiasa membutuhkan metoda dan

cara kerja, serta produk atau peralatan kerja yang secara nyata mampu memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomis produktif sesuai ciri khas mata pencahariannya, dengan memberikan peluang dilakukannya diversifikasi kegiatan usaha.

Berbagai jenis teknologi tepat guna telah banyak berkembang di pedesaan saat ini, yang merupakan indikator dari kemajuan, keterbukaan masyarakat terhadap pembaharuan, serta tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat desa. Masalah teknologi tepat guna ini, tentu akan selalu menjadi pokok pengamatan yang menarik bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di pedesaan. Berbagai jenis teknologi sesuai kualifikasi perkembangannya akan di jumpai di pedesaan, sehingga para mahasiswa KKN dapat mengkaji kemungkinan pengembangannya, bahkan berpeluang untuk memperkenalkan teknologi yang lebih modern dan tepat guna bagi masyarakat pedesaan.

Pengkajian, pengembangan dan pemasyarakatan jenis teknologi tepat guna yang lebih modern bagi masyarakat pedesaan, harus di dasarkan pada kebutuhan, potensi sosial ekonomi atau potensi sumber daya, keadaan sosial budaya, kondisi geografis/ lingkungan hidup serta kemampuan pengelolaan masyarakat desa.

B. Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dalam Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Sekurang-kurangnya terdapat tiga komponen penting yang selalu terlibat dalam pelaksanaan KKN ini, yaitu : Panitia Pelaksana KKN (policy makers), dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa (agents) dan masyarakat desa (adopters). Ketiga unsur ini saling terkait dalam program yang dirancang. Ini berarti, secara teoritis dan praktis dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa harus sadar benar dan mengetahui dengan jelas hal-hal yang penting untuk dilakukan dalam menjalankan program yang telah dirancang dan hal-hal yang patut pula untuk dihindarkan.

DPL dan mahasiswa dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana KKN di lapangan mempunyai peran strategis dalam terlaksananya program kerja yang telah dirumuskan.

Sesuai dengan namanya, Dosen Pembimbing Lapangan yang disingkat DPL ialah dosen yang membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pembimbingan dilakukan sebelum dan semasa mahasiswa berada di lokasi, bahkan dalam beberapa hal juga sesudah mahasiswa ditarik dari lokasi. Pembimbingan dimaksudkan agar mahasiswa dalam melaksanakan KKN dapat terarah dan berlangsung sesuai dengan rencana, tertib sesuai dengan sistem yang ditentukan dan sudah barang tentu agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan maksud diadakannya KKN.

Dilihat dari asal serta kedudukannya, pembimbing KKN dikelompokkan dalam tiga kategori : pembimbing formal, pembimbing non formal dan pembimbing informal (Panitia Pelaksana KKN IAIN Angkatan ke-27, 1994 = 66).

Pembimbing formal, adalah pembimbing yang persona- lianya diambil dari dosen/ tenaga edukatif di Fakultas- fakultas yang ada di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga dan diangkat secara resmi oleh Rektor untuk menjadi pembimbing KKN, sedangkan tugas-tugasnya ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.

Pembimbing non formal ialah orang yang karena jaba- tannya atau karena kedudukannya terlibat dalam pembimbing- an KKN di lapangan mereka antara lain : Camat, kepala KUA, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa dan perangkat desa lain- nya.

Pembimbing informal ialah orang yang karena kedudu- kannya sebagai Bapak/Ibu keluarga yang rumahnya ditempati oleh mahasiswa KKN selama berada di lokasi. Tidak sedikit, bahkan pada umumnya pembimbing nonformal merangkap sebagai pembimbing informal, karena biasanya para peserta KKN ditempatkan di rumah Kepala Desa, Kepala Dusun atau diru- mah perangkat desa lainnya.

Dalam pembahasan selanjutnya yang dimaksud dengan DPL dalam laporan ini ialah pembimbing formal, kecuali apabila disebutkan lain.

Dalam organisasi dan mekanisme KKN, keberadaan DPL mutlak diperlukan. Untuk dapat menilai secara logis bahwa DPL itu bukan sekedar pemberi nilai kepada mahasiswa, tetapi eksistensinya memang diperlukan, perlu dilihat dari beberapa sisi, antara lain dari makna KKN itu sendiri dan dari sasaran yang ingin dituju dari kegiatan KKN.

Dilihat dari maknanya, secara singkat dapat dirumuskan bahwa KKN adalah suatu bentuk mengabdikan pada masyarakat yang bersifat khusus, karena dalam KKN diintegrasikan dan dipadukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan melibatkan sejumlah mahasiswa dan staf pengajar serta dilaksanakan secara interdisipliner dan kurikuler.

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa ada tiga unsur penting yang dimiliki dalam pengertian KKN, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Sebagai kegiatan pendidikan, melalui KKN mahasiswa diperkenalkan secara langsung dengan masyarakat dan permasalahannya serta dengan cara kerja antar sektor atau interdisipliner. Banyak input-input yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun mahasiswa mungkin nantinya tidak akan bekerja di lingkungan desa, akan tetapi paling sedikit mereka sudah menyelami masalah-masalah masyarakat pedesaan yang merupakan kira-kira 80% dari rakyat Indonesia. Sebagai *man of social*, lewat kegiatan KKN mahasiswa belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda yang mereka alami sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan penelitian, mahasiswa diajak untuk menelaah dan merumuskan permasalahan yang begitu kompleks. Di lokasi yang ditempatinya mahasiswa harus mencari, menelaah potensi-potensi dan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat serta merumuskannya. Dalam pelaksanaan

KKN, kegiatan ini dilaksanakan terutama pada tahap awal. Hasil penelitiannya itu diolah dan dirumuskan dalam bentuk Rencana Program Kerja (RPK) yang akan dioperasikan setelah mendapat persetujuan DPL dan Kepala Desa.

Sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat, melalui KKN mahasiswa mengamalkan ilmu, teknologi, seni dan agama untuk memecahkan permasalahan dan menanggulangnya secara pragmatis. Dengan perkataan lain, melalui KKN mahasiswa membantu pembangunan masyarakat.

Dari paparan di atas terbukti bahwa KKN tidak semata-mata mementingkan aspek pengabdian, tetapi aspek akademis pun terkait dan ikut menentukan dalam proses pelaksanaannya. Sekalipun demikian, sesuai dengan namanya KKN adalah Kuliah Kerja Nyata di lapangan, maka porsi dan penilaian aspek pengabdiannya lebih besar. Hal ini terbukti dari 6 aspek yang dinilai, aspek pelaksanaan program kerja di lapangan mendapat nilai yang tertinggi dengan bobot 3 sks (Panitia Pelaksana KKN IAIN Angkatan ke-27, 1994 :58-59).

Agar supaya kegiatan KKN sesuai dengan tujuan dan idealismenya, diperlukan adanya pihak yang bisa mengarahkan, membimbing, mendidik dan memotivasi mahasiswa pelaksana KKN. Pihak tersebut adalah DPL. Tanpa pembimbingpun mungkin saja KKN hanya menjurus kepada satu aspek kegiatan, tetapi melupakan pelaksanaan aspek lainnya, dan hal ini tidak boleh terjadi.

Demikian pula apabila dilihat dari sasaran KKN, peran dan tugas DPL adalah sangat strategis. Sebagaimana diketahui, secara umum ada tiga sasaran utama yang ingin dicapai melalui kegiatan KKN, yaitu : personality development, community development dan institutional development (Masykur Rahmat, 1989:1).

Personality development, dalam hal ini mahasiswa pelaksana KKN, dengan adanya interaksi sosial selama KKN diharapkan adanya perubahan-perubahan terutama tentang dedikasi dan orientasi mahasiswa terhadap masyarakat.

Community development, dalam hal ini masyarakat yang merupakan ajang KKN, diharapkan adanya perubahan-perubahan baik dalam cara berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tujuan pembangunan.

Institutional development, dalam hal ini Perguruan Tinggi yang menerjunkan mahasiswanya untuk ber-KKN. Perguruan Tinggi pun diharapkan akan memperoleh masukan-masukan baik yang berupa pendapat, kasus-kasus maupun masukan lainnya yang sangat berguna dalam upaya evaluasi dan pengembangan relevansi kurikulum pendidikan tinggi bukan sekedar untuk pengembangan ilmu dan ilmu untuk ilmu, tetapi juga untuk masyarakat dan bangsa.

Usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran KKN seperti diuraikan di atas bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Tetapi merupakan usaha dan kegiatan yang sangat kompleks, supaya pelaksanaan KKN tidak terjebak dalam kondisi dan situasi di mana salah satu atau lebih dari

sasaran itu menjadi terabaikan. Untuk itu maka posisi dan fungsi DPL sebagai salah satu unsur pemandu dalam pelaksanaan KKN menjadi amat strategis dan penting.

Kedudukannya merupakan mata rantai penghubung instansi dan mahasiswa, serta pengendalian kegiatan mahasiswa agar tetap konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme pembimbingan yang cermat, kontinyu dan menyeluruh, baik yang menyangkut proses pembimbingan itu sendiri, pengendalian dan pengawasan serta motivasi agar mahasiswa dapat berprestasi dalam melaksanakan kegiatan KKN.

Dari pengertian KKN yang mengintegrasikan tiga kegiatan, serta sasaran yang ingin dicapai melalui KKN, maka untuk tidak menyebutkan seluruh peran sampai yang sekecil-kecilnya, peran DPL itu dapat disebutkan sebagai: *pembimbing; pengarah dan pemberi motivasi; penghubung antara mahasiswa dengan aparat pemerintah dan masyarakat; pembina; pengawas; penilai kegiatan mahasiswa peserta KKN dan pemberi contoh suri tauladan yang baik.*

Peran DPL di atas operasionalisasinya terjabarkan dalam tugas-tugas DPL sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

#### 1. *Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).*

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah salah satu unit komando yang merupakan ujung tombak dan berhadapan langsung dengan mahasiswa dalam kegiatan pembimbingan dan pengawasan agar kegiatan KKN berhasil

secara optimal. Dengan demikian tugas yang harus dikelola dan dilaksanakan DPL begitu banyak dan kompleks. Untuk dapat memerankan diri sebagai DPL dan dapat melaksanakan tugas yang diembannya, seorang DPL dituntut dapat menguasai hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme dan permasalahan operasional pelaksanaan KKN.

Panitia Pelaksana KKN IAIN Sunan Kalijaga dalam Surat Edarannya telah merumuskan bahwa tugas-tugas DPL itu ialah :

- a. Bertindak sebagai anggota Panitia Pelaksana KKN di tingkat kecamatan dan desa.
- b. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan di lokasi KKN yang telah ditetapkan.
- c. Membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKN dengan masyarakat dan instansi-instansi di lokasi KKN.
- d. Menegakkan disiplin dan mengarahkan serta memotivasi kegiatan mahasiswa KKN demi tercapainya program-program KKN dan membantu memecahkan masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi mahasiswa dan melaporkan kepada Panitia Pelaksana KKN.
- e. Melakukan pemantauan atau monitoring interaksi antara mahasiswa KKN dan pamong desa, instansi-instansi dan masyarakat untuk dilaporkan kepada Panitia Pelaksana KKN.

- f. Mengarahkan, memeriksa dan menilai laporan tertulis mengenai pembimbingan mahasiswa KKN.
- g. Melakukan penilaian dalam rangka evaluasi.
- h. Menyusun laporan tertulis mengenai kegiatan mahasiswa yang dibimbingnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Oleh karena kegiatan KKN dibagi kepada berapa tahapan, yang secara garis besarnya ada tiga tahapan, yaitu: tahap persiapan atau masa sebelum mahasiswa diterjunkan di lokasi; tahap mahasiswa berada di lokasi, maka tugas-tugas DPL pun terkait dengan tahapan-tahapan tersebut. Panitia pelaksana KKN IAIN Sunan Kalijaga telah memerinci tugas tersebut pada masing-masing tahapan, tetapi dalam laporan penelitian ini hanya akan dikemukakan secara garis besarnya saja.

a. Tugas dan Kewajiban DPL pada tahap pra KKN

Tahap pra KKN atau masa persiapan ialah segala kegiatan yang berkaitan dengan KKN sebelum mahasiswa diterjunkan di lokasi. Pada masa ini meliputi kegiatan: pendaftaran/mahasiswa yang memenuhi persyaratan mendaftarkan diri sebagai calon peserta KKN, pengelompokan peserta dan DPL ke lokasi-lokasi KKN, observasi DPL, pembekalan bagi calon peserta KKN serta ujian penguasaan materi pembekalan, bhakti kampus dan terakhir upacara pelepasan/pemberangkatan peserta KKN.

Tugas dan kewajiban DPL yang menonjol pada tahap ini ialah :

1) Melakukan observasi ke desa/lokasi yang menjadi wilayah bimbingannya. Selain melakukan observasi, pada kesempatan ini oleh DPL digunakan untuk memperkenalkan diri kepada pejabat-pejabat di Kecamatan dan kepada para kepala desa yang digunakan sebagai lokasi KKN, sambil menjelaskan hal-hal yang menyangkut KKN, antara lain :

- waktu pelaksanaan dan saat penerjunan
- jumlah peserta dan besarnya biaya hidup (living cost)
- bidang program KKN IAIN
- tempat tinggal menginap selama di lokasi
- kebijaksanaan panitia pelaksana KKN dalam mekanisme pengelolaan KKN IAIN.

Dalam kegiatan observasi, DPL hendaknya memperoleh diskripsi desa mengenai :

- topografi; geografi, demografi maupun tata pemerintahannya
- potensi-potensi desa dan hambatan-hambatannya
- Permasalahan-permasalahan yang ada
- Program pembangunan yang sedang/akan dilaksanakan

2) Memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang menjadi bimbingannya sesuai jadwal yang ditentukan panitia. Pada kesempatan ini dibicarakan mengenai :

- diskripsi desa serta permasalahan yang ada sesuai hasil observasinya
- prgram yang sedang/akan dilaksanakan di desa

- program yang diinginkan oleh kecamatan dan desa
  - tempat menginap/pondokan
  - policy DPL dalam melaksanakan tugas pembimbingan
  - rencana pemberangkatan dan perlengkapan yang perlu dipersiapkan/dibawa
  - memperjelas cara-cara observasi; penyusunan RPK, pelaksanaan program kerja, laporan mingguan, laporan akhir individual maupun kolektif
  - memperjelas cara-cara pengisian Buku Catatan Kegiatan Harian, pengisian presensi di lokasi, pemberian Kartu Kuning maupun Kartu Merah
  - Memilih Ketua Kelompok di masing-masing lokasi
  - dan lain-lain yang dianggap perlu
- 3) Mengarahkan pelaksanaan bakti Kampus sesuai dengan ketentuan panitia. Kegiatan ini dapat digunakan untuk mempererat hubungan DPL dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
- 4) Mengikuti upacara pelepasan oleh Rektor.

Peranan dosen pembimbing lapangan (DPL) dalam melakukan observasi I dan II sebagai bahan studi kelayakan untuk mahasiswa peserta KKN yang dibimbing, juga sangat ditentukan pula oleh pengalamannya menjadi DPL dalam KKN. Hasil Wawancara melalui pedoman wawancara yang dilakukan kepada dosen pembimbing lapangan (DPL) KKN menyatakan :

Tabel 26. Hubungan dan pengaruh dari peranan dan pengalaman menjadi DPL - KKN masa Observasi I - II

Pengalaman/Peranan	Frekuensi menjadi DPL	Persiapan dlm Observasi	Metode pendekatan dalam Observasi
1. Kemampuan dalam melakukan Observasi.	72 %	51 %	95 %
2. Pelaksanaan dalam masa observasi.	85 %	70 %	85 %
3. Ketrampilan dalam memberikan pembekalan KKN	85 %	65 %	90 %

Tabel di atas menjelaskan tentang hubungan dan pengaruh dari peranan dan pengalaman menjadi DPL - KKN masa observasi I dan II, yaitu dari angket yang disebarakan kepada 15 DPL sebagai berikut, bagi DPL yang sering membimbing KKN (frekuensi menjadi DPL) 72 % mengatakan ada hubungan dan pengaruh dengan kemampuan dalam melakukan observasi, 85 % menyatakan ada hubungan dan pengaruh dengan pelaksanaan observasi dan ketrampilan dalam memberikan pembekalan KKN. Demikian juga persiapan dalam observasi mempunyai hubungan dan pengaruh dengan kemampuan dalam melakukan observasi (jawaban DPL mencapai 51 %), pelaksanaan dalam masa observasi (jawaban DPL mencapai 70 %) dan ketrampilan dalam memberikan pembekalan. Kepada peserta (jawaban DPL mencapai 65 %). Metode pembekalan yang dipakai juga mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap kemampuan dalam melakukan observasi (mencapai 95 %), pelaksanaan dalam observasi (mencapai 85 %) dan ketrampilan dalam memberikan pembekalan (mencapai 90 %).

Pernyataan di atas menjelaskan, bahwa semakin sering menjadi Dosen pembimbing lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN maka semakin dapat melaksanakan peranannya dalam tugas-tugas sebagai DPL. Maka observasi yang dilakukan DPL sebagai masa sebelum penerjunan peserta KKN ke lokasi membutuhkan peran seorang DPL, yaitu : kemampuan dalam melakukan observasi, peranannya dalam pelaksanaan observasi dan ketrampilannya dalam memberikan pembekalan sebelum mahasiswa berada di lokasi. Hal ini penting untuk pembekalan kepada mahasiswa peserta KKN yang dibimbingnya. Mahasiswa peserta KKN perlu memiliki gambaran tentang keadaan lokasi, dalam hal ini informasi dan keterangan DPL dari hasil studi pendahuluan harus disampaikan kepada peserta, sebelum mereka terjun ke lapangan. Pada saat ini, DPL untuk pertama kalinya secara formal memberikan bimbingan dan pengarahan.

Maka untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan diinformasikan kepada peserta KKN, dalam studi kelayakan DPL harus melakukan observasi. Dalam observasi ini DPL tidak hanya mempersiapkan pondokan peserta KKN dan menyampaikan keperluan lain yang dibutuhkan, tetapi yang mensosialisasikan pelaksanaan KKN kepada semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kesempatan yang sama DPL harus memberikan masukan-masukan penting sehubungan dengan penyusunan rencana program kerja (RPK) KKN kepada mahasiswa peserta KKN.

b. Tugas Kewajiban DPL pada waktu peserta KKN berada di lokasi

Selama pelaksanaan KKN di lokasi, peran DPL meliputi: mengarahkan masa observasi dan pembuatan Rencana Program Kerja (RPK) yang dilaksanakan mahasiswa peserta KKN, membimbing masa pelaksanaan program kerja tahap awal, melakukan evaluasi program kerja tahap awal, mengarahkan masa pelaksanaan program kerja tahap kedua, dan melakukan evaluasi tahap akhir.

Pembimbingan masa observasi dan penyusunan RPK, adalah merupakan tahap awal yang sangat penting. Tahap ini yang diperlukan adalah mengumpulkan informasi yang akan dijadikan bahan untuk pelaksanaan KKN, disamping sebagai pendekatan awal dengan aparat desa dan penentuan tempat pondokan peserta KKN. Dalam masa observasi ini, peranan DPL menjadi sangat penting dan peranannya tersebut mempunyai hubungan dan pengaruh dengan pengalaman menjadi DPL.

Pada tahap pelaksanaan KKN peranan DPL diarahkan pada bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa peserta KKN, dan mulai pembuatan Rencana Program Kerja (RPK) sampai pelaksanaan KKN berakhir. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan mengenai Rencana Program Kerja kepada peserta KKN, dosen pembimbing lapangan (DPL) 93 % telah melaksanakan tugasnya meliputi :

- a) menjelaskan maksud, tujuan, manfaat, reliabilitas dan fleksibilitas program kerja yang akan disusun oleh mahasiswa peserta KKN.

- b) melakukan motivasi dan bimbingan secara operasional dalam proses bermasyarakat hubungannya dengan program KKN.
- c) Bersama-sama mahasiswa menterjemahkan program kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan program KKN IAIN Sunan Kalijaga.

Hasil wawancara melalui pedoman wawancara kepada 15 orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai DPL pada waktu peserta KKN berada di lokasi, menyatakan :

Tabel 27. Peran DPL dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada waktu peserta KKN berada di lokasi

No.	Peranan yang Dilakukan	Frekuensi	Hasil yg dicapai
01.	Melakukan pendekatan partisipatif kepada pamong desa dan tokoh masyarakat	92 %	Baik
02.	Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa peserta KKN dalam rangka masa observasi dan pembuatan Rencana Program Kerja (RPK)	85 %	Baik
03.	Menghadiri perumusan Rencana Program kerja di tingkat desa dan kecamatan	55 %	Baik
04.	Bersama peserta KKN mengkoordinasikan RPK dengan permasalahan - permasalahan masyarakat desa	80 %	Cukup
05.	Memantau pelaksanaan program kerja melalui kunjungan ke lokasi setiap minggu.	85 %	Baik

Pernyataan dalam tabel di atas menjelaskan, bahwa selama observasi dan penyusunan Rencana Program Kerja yang

dilakukan mahasiswa peserta KKN sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan DPL. Karena observasi di sini merupakan landasan untuk menyusun Rencana Program Kerja, sedangkan Rencana Program Kerja menjadi pedoman pelaksanaan kerja KKN.

Tabel di atas juga menjelaskan, setelah Rencana Program Kerja tersusun kemudian diadakan diskusi di tingkat desa, dengan dihadiri oleh peserta KKN, DPL, dan pemerintah desa. Hasil diskusi tingkat desa ini kemudian dibawa ke forum diskusi tingkat Kecamatan, dengan dihadiri oleh utusan dari masing-masing lokasi di wilayah Kecamatan tersebut, DPL, pihak panitia pelaksana KKN dan aparat pemerintahan tingkat Kecamatan. Dengan demikian Rencana Program Kerja yang telah disusun itu diketahui secara jelas oleh pihak terkait yang terlibat selama pelaksanaan KKN berlangsung.

Dalam melaksanakan program kerja tidak jarang dijumpai masalah yang menjadi kendala pelaksanaan KKN. Kadang-kadang program yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena faktor tenaga, sarana dan lainnya. Seperti juga munculnya paket baru dari pemerintah setempat yang harus direalisasikan dalam program KKN, salah satu kendala yang sering muncul, besar atau kecil kasus serupa ini akan mengganggu pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. dalam keadaan yang demikian pernyataan DPL dari hasil wawancara menyatakan, untuk mengatasi kendala tersebut mereka melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa dan peserta KKN dengan cara melakukan evaluasi program.

Dosen Pembimbing Lapangan melakukan evaluasi diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi, sebagai dasar untuk mengambil keputusan melalui pertimbangan dan penarikan kesimpulan dari Rencana Program Kerja (*lihat Byon, 1962*). artinya melakukan penilaian sebagai upaya menetapkan program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam KKN.

Tabel 28 Peran DPL dalam melakukan evaluasi dan pemantauan Program Kerja KKN

No.	Peran Yang Dilakukan	Frekuensi Jawaban dalam %
01.	Melakukan pengambilan keputusan dan perencanaan	85 %
02.	Memotivasi dan menumbuhkan keyakinan kepada mahasiswa dan pamong desa	75 %
03.	Menjelaskan program kerja KKN kepada seluruh khlayak sasaran yang terkait	70 %
04.	Melakukan pemantauan, evaluasi awal, evaluasi proses dan evaluasi akhir.	75 %

Dari kesimpulan tabel di atas, untuk melaksanakan kegiatan pemantauan secara tepat, maka pada masa pelaksanaan program DPL harus memiliki catatan perkembangan pelaksanaan program kerja bagi setiap peserta KKN. Catatan ini berisi perkembangan pelaksanaan secara periodik, berdasarkan hasil pemantauan langsung dari peserta KKN atau tidak langsung, misalnya diperoleh melalui keterangan pamong desa atau masyarakat setempat. Dan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul, mahasiswa peserta KKN diharuskan memberikan laporan pelaksanaan Program Kerja kepada DPL setiap minggu atau pada waktu jadwal kunjungan DPL.

Evaluasi dilakukan sebagai proses penilaian terhadap pelaksanaan program kerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejarah masa keberhasilan yang telah dicapai dari target yang ditentukan, faktor penunjang dan penghambat selama pelaksanaan program kerja tersebut. Dari hasil evaluasi kemudian dapat diketahui langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga program kerja yang masih ada dapat diselesaikan. Peran DPL dalam melakukan evaluasi dan pemantauan dalam kesempatan ini sangat dibutuhkan dan penting.

Dalam meningkatkan efektifitas pembimbingan dan pemantauan, beberapa faktor seperti kesiapan dan kemampuan DPL dalam menguasai dan mensosialisasikan permasalahan yang berkaitan dengan program KKN, intensitas dan kualitas pembimbingan dan pemantauan, waktu dan frekuensi pembimbingan dan dan pemantauan, metode pembimbingan dan pemantauan perlu dirumuskan secara jelas.

Secara operasional tugas dan kewajiban DPL pada waktu peserta KKN berada di lokasi dapat didiskripsikan sebagai berikut :

Tahap ini dimulai sejak mahasiswa diberangkatkan ke lokasi sampai mereka ditarik kembali dari lokasi. Keseluruhannya memakan waktu 8 minggu atau 60 hari.

Pada masa ini selain DPL harus memimpin pemberangkatan ke lokasi lalu menyerahkan peserta kepada Kepala Desa, Bapak/Ibu yang ditempati, dan mengadakan pamitan dengan Kepala Desa, perangkat desa lainnya serta Bapak/Ibu yang ditempati dan melaksanakan penarikan peserta dari lokasi, juga harus

datang di lokasi minimal satu minggu satu kali untuk melaksanakan pembimbingan.

Ada lima tahapan kegiatan yang berlangsung selama mahasiswa berada di lokasi, yaitu : masa observasi dan pembuatan Rencana Program Kerja (RPK), masa pelaksanaan program kerja tahap pertama, masa evaluasi pelaksanaan program kerja tahap pertama, masa pelaksanaan program kerja tahap kedua, masa evaluasi tahap akhir. Oleh karena itu tugas DPL selama 8 minggu telah diatur secara rinci oleh Panitia Pelaksana sesuai dengan tahapan kegiatannya. Dari edaran yang dikeluarkan Panitia Pelaksana tentang : Syarat, Tugas, Kewajiban. Hal yang perlu diumumkan dan sanksi bagi Dosen Pembimbing Lapangan KKN IAIN Sunan Kalijaga, tugas-tugas DPL selama mahasiswa berada di lokasi, secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) *Minggu I* :

Selain melaksanakan kegiatan yang bersifat administratif, tugas DPL yang menonjol pada minggu pertama adalah :

- a) Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan observasi untuk keperluan pembuatan Rencana Program Kerja.
- b) Mengadakan rapat diskusi per kelompok/desa tentang Rencana Program Kerja mahasiswa, mengoreksi/membetulkan konsep RPK baik individual maupun kolektif serta jadwal kegiatan selama 60 hari, bila perlu juga membentuk Koordinator Bidang (Korbid).

- c) Menghadiri diskusi/sarasehan tentang Rencana Program Kerja di tingkat desa dan Kecamatan.
- d) Memberikan jalan keluar kesulitan yang dihadapi mahasiswa serta memberikan motivasi dan pengarahan yang dipandang perlu.
- e) Memeriksa Buku Catatan Kegiatan Harian dan menandatangani
- f) Mengesahkan/menandatangani Rencana Program Kerja Individual maupun Kolektif, dan membawa pulang serta menyerahkan kepada Panitia Pelaksana.
- g) Membuat laporan bimbingan DPL di lokasi dan menyampaikan kepada Panitia.

## 2) *Minggu II, III dan IV*

Selain melaksanakan kegiatan yang bersifat administratif, tugas DPL pada Minggu II dan III adalah :

- a) Memeriksa presensi, memeriksa Buku Catatan Kegiatan Harian dan menandatangani.
- b) Mengecek pelaksanaan program kerja baik individual maupun kolektif, sejauh mana hasil yang telah diperoleh.
- c) Menanyakan hambatan yang ditemui dan memberikan motivasi/pengarahan/bimbingan sebagai jalan keluar, agar pelaksanaan program kerja tahap I dapat berhasil sesuai dengan target.

## 3) *Minggu V*

Dengan berakhirnya Minggu IV berarti mahasiswa sudah berada di lokasi kurang lebih satu bulan dan masuk Minggu

V berarti memasuki bulan kedua, untuk itu tugas DPL pada Minggu V selain melaksanakan kegiatan administrasi, juga :

- a) Menyerahkan uang living cost mahasiswa tahap II kepada tuan rumah bersama Ketua Kelompok dan menyelesaikan administrasinya.
- b) Mengadakan rapat kelompok dengan mahasiswa di setiap kelompoknya untuk membahas & mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahap I baik individual maupun kolektif, kemudian menginventarisasi permasalahan yang ada untuk dicarikan permasalahannya serta bisa meningkatkan pelaksanaannya pada tahap II
- c) Memulai pelaksanaan program kerja tahap II
- d) Mengecek/memeriksa presensi, Buku Catatan Kegiatan Harian dan menandatangani.

#### 4) *Minggu VI dan VII*

Tugas DPL pada Minggu VI dan VII pada dasarnya sama dengan Minggu II, III dan IV, kecuali untuk Minggu VI ditambah dengan mempersiapkan kunjungan Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas, Panitia Pelaksana dan DPL ke lokasi. Dipersiapkan kegiatan-kegiatan apa yang perlu ditinjau dan bilamana perlu diresmikan. Pada Minggu VII, DPL juga harus membimbing pengisian Bangko Hasil Sementara Pelaksanaan KKN di lokasi dan menyerahkannya kepada Panitia pada minggu VIII. Kalau ada kunjungan Pimpinan Institut dan Panitia Pelaksana, DPL juga harus menyertainya.

5). *Minggu VIII*

Minggu VIII adalah minggu terakhir mahasiswa berada di lokasi. Oleh karena itu selain menjalankan tugas yang bersifat administrasi, pada minggu ini tugas DPL adalah :

- a) Mengecek presensi dan Buku Catatan Kegiatan Harian
- b) Mengadakan rapat Kelompok untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja tahap II, sambil tetap memberikan bimbingan dan motivasi agar hari-hari terakhir tetap digunakan untuk pelaksanaan program kerja.
- c) Mempersiapkan penarikan peserta dari lokasi dan pamong desa lainnya, serta menitipkan kegiatan KKN yang belum selesai untuk diberikan penyelesaiannya oleh masyarakat.

6). *Pada waktu penarikan mahasiswa*

Tugas DPL pada waktu penarikan mahasiswa dari lokasi adalah:

- a) Menjemput mahasiswa peserta KKN di pondokan masing-masing dengan kendaraan yang disiapkan Panitia.
- b) Menyampaikan beberapa informasi dari Panitia dan mengingatkan kepada para peserta bahwa sepulangnya dari lokasi untuk melaksanakan tugas menyusun laporan akhir.
- c) Mengikuti upacara pamitan di Kabupaten
- d) Membuat laporan bimbingan DPL dari lokasi laporan bimbingan ini harus dibuat setiap minggu dan menyerahkannya kepada Panitia baik diminta ataupun tidak.

c. Tugas DPL Pasca KKN

Ditariknya peserta KKN dari lokasi tidak berarti tugas DPL berakhir. Masih ada tugas-tugas yang harus dilaksanakannya dan merupakan kaitan dari mekanisme pelaksanaan KKN. Tugas-tugas DPL sesudah ditariknya peserta dari lokasi ialah :

- 1) Membimbing dan menggerakkan peserta KKN dalam menyusun laporan akhir baik individual maupun kolektif.
- 2) Mengoreksi konsep laporan akhir individual dan kolektif sebelum digandakan.
- 3) Mengesahkan/menandatangani laporan akhir baik individual maupun kolektif.
- 4) Menguji peserta KKN yang berada di bawah bimbingannya pada waktu ujian akhir bersama dengan penguji dari Fakultas/Panitia.
- 5) Memberi penilaian kepada peserta KKN yang dibimbingnya pada kartu penilaian yang telah disediakan dan menyerahkan kepada Panitia Pelaksana untuk bahan yudicium Dewan Pertimbangan.
- 6) Membuat laporan Akhir DPL dan menyerahkannya kepada Panitia sesuai dengan jadwal.

Demikianlah tugas-tugas DPL dalam bentuk operasional. apabila tugas-tugas tersebut dijalankan dengan baik, tidak sekedar manajemen dan mekanisme KKN berjalan, tetapi juga akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan KKN oleh peserta di lokasi, sebaliknya apabila tugas-tugas tersebut tidak dijalankan maka bukan saja berpengaruh kepada manajemen dan

mekanisme KKN, tetapi juga akan berdampak negatif dalam pelaksanaan KKN di lokasi.

Sebagai contoh apabila pada masa persiapan DPL tidak melaksanakan tugasnya seperti menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang akan diadakannya KKN, mencari pondokan, mencari data awal mengenai diskripsi desa, dll. Maka ada kemungkinan kedatangan mahasiswa di lokasi ditolak oleh Kades, karena dia belum tahu mengenai hal itu. Atau sesampai di lokasi belum tersediapondokan, karena DPL tidak mencarikan, keadaan yang demikian jelas akan menurunkan mental dan semangat peserta KKN.

Demikian pula apabila DPL pada minggu pertama DPL Tidak datang di lokasi, maka akan berpengaruh pada pelaksanaan program pada minggu-minggu berikutnya. Masa awal berada di lokasi adalah masa kritis bagi peserta KKN, karena dia baru saja berkenalan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang baru. Banyak mahasiswa dengan mudah dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru, sekalipun kondisi lingkungan itu jauh berbeda dengan lingkungan dia sebelumnya. Tetapi tidak sedikit mahasiswa yang mengalami kesulitan dan membutuhkan usaha serta waktu yang lama. Di sisi lain peserta harus melakukan observasi untuk menyusun rencana program kerja. Banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta pada masa ini, sehingga kalau tidak dibimbing dan diarahkan bisa jadi mahasiswa menyusun rencana program kerja hanya dari belakang meja sehingga ketika direalisasikan tidak mendapat dukungan dari masyarakat karena tidak dibuat dari permasalahan

han yang ada dan tidak dibutuhkan masyarakat. Atau bisa jadi program itu tidak bisa direalisasikan karena terlalu muluk-muluk, sehingga tidak bisa didanai baik yang berasal dari swadaya atau dari peserta KKN sendiri. Atau program itu tidak terealisasi, karena pada waktu penyusunan program tidak/kurang dapat bimbingan.

Dari uraian tugas-tugas DPL ternyata tugas DPL itu begitu banyak dan kompleks, berat tapi mulia. Keberadaan DPL mutlak diperlukan dalam mekanisme KKN.

## 2. *Frekuensi Pembimbingan*

Pada dasarnya makin sering DPL DPL datang di lokasi, bimbingan dilakukan, akan makin baik pelaksanaan program KKN. akan tetapi karena tugas dosen tidak sekedar membimbing KKN, tetapi banyak tugas-tugas pokok lainnya, maka bimbingan dilakukan sekurang-kurangnya satu minggu satu kali secara berkala. Tingginya frekuensi dan ekjegan bimbingan yang dilakukan DPL akan sangat membantu terlaksananya program kerja KKN dengan baik. Manfaat lain adalah timbulnya semangat dari mahasiswa karena mereka merasa diperhatikan.

Kehadiran DPL di lokasi bukanlah hanya sekedar kunjungan belaka, akan tetapi benar-benar membimbing, mengarahkan, memantau dan memotivasi peserta dalam melaksanakan program kerjanya. Satu hal yang tidak kalah pentingnya ketika DPL datang di lokasi adalah konsultasi dengan pemerintah setempat, masyarakat juga tuan rumah, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KKN dan aktivitas serta tindakan sehari-hari para peserta KKN. Jika ditemukan masalah, DPL harus segera

menyelesaikannya. apabila tidak mampu menyelesaikannya sendiri, segera melaporkan kepada Panitia Pelaksana.

Dalam melaksanakan bimbingan, satu hal yang perlu dihindari ialah melakukan pengawasan dan pembimbingan yang hanya sampai di Ibukota Kecamatan atau hanya di satu desa/lokasi saja. Para peserta dari desa/lokasi lainnya dipanggil untuk berkumpul. Hal seperti ini akan mengurangi validitas pembimbingan, karena DPL tidak mengetahui secara riil kondisi peserta di lokasi yang tidak dikunjunginya. Lebih-lebih apabila bimbingan hanya dilakukan di kampus, dengan cara mahasiswa meninggalkan lokasi untuk melakukan konsultasi dengan DPL. Bimbingan yang demikian akan membuat KKN berjalan tidak seperti yang diharapkan dalam tujuan KKN.

Keberhasilan bimbingan dan pengawasan DPL terhadap peserta KKN yang dibimbingnya juga dipengaruhi oleh faktor rasio antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan peserta yang dibimbingnya. Semakin kecil rasio tersebut akan semakin baik dan berhasil dalam melaksanakan bimbingan. Sebaliknya kalau rasio DPL dan peserta semakin besar, akan konsep efektif pembimbingan yang dilakukan.

Mengingat waktu/kesempatan DPL untuk datang ke lokasi terbatas, karena juga harus melaksanakan tugas pokok lainnya, jarak antara kampus dengan lokasi KKN dan transportasi ke lokasi juga umumnya sulit, oleh para DPL dipandang memadai rasio tersebut berkisar 1: 14-16. Artinya seorang DPL membimbing sebanyak 14 sampai 16 peserta KKN. Adapun jumlah lokasi yang dibimbingnya dipandang memadai sebanyak dua

desa/lokasi.

Mengingat hal di atas, hendaknya menjadi bahan pertimbangan bagi Panitia Pelaksana dalam menetapkan dan menempatkan DPL di lokasi KKN dengan jumlah peserta yang dibimbingnya.

### C. Peran Mahasiswa KKN dalam Pembangunan Pedesaan

Mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Kurang lebih 80% masyarakat Indonesia tinggal di desa, bagin twerbesar mereka keadaannya memprihatinkan, miskin dan lemah. Oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus mendapat perhatian dari semua pihak, termasuk Perguruan Tinggi. Dalam kernagka pikiran demikian dan dalam rangak ikut pempercepat proses pembangunan di pedesaan, KKN diadakan.

Pembangunan desa memiliki ciri khusus, yaitu dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam bentukprakarsa swadaya gotong-royong masyarakat, sedagn pemerintah hanya memberikan bimbingan dan dana bantuan. Oleh karenanya strategi pembangunan desa adalah peningaktan sumber daya manusia sebagai potensi yang selanjutnya di kembangkan menjadi kemampuan untuk berprakarsa dan berswadaya membangun desanya yang berasaskan kemandirian dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia (Sutama, 1994 : 2).

Berdasarkan kondisi sebagian besar masyarakat pedesaan itu miskin dan lemah, terjadi pola pemikiran baru yang lebih jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan

masyarakat pedesaan mempunyai tiga sasaran utama, yaitu : memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran dan pemerataan pendapatan. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa, dengan sasaran utama memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran dan pemerataan pendapatan (gatot Murdjito, 1989 : 2)

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pembangunan khususnya pembangunan pedesaan adalah berkaitan erat dengan perubahan sosial. Menurut Lockman Soetrisno (Prisma, Jauhari, 1988 : 13) suatu pembangunan dikatakan berhasil idak sekedar pembangunan itu menaikkan taraf hidup masyarakat, tetapi harus dengan sejauhmana pembangunan itu dapat menimbulkan kemauan dan kemampuan dari suatu masyarakat untuk mandiri, dalam arti kemauan masyarakat itu untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan, baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat.

Apabila persoalan pembangunan desa di atas di kaitkan dengan kegiatan KKN, pertanyaan yang muncul adakah sumbangan yang dapat diberikan dari pelaksanaan KKN terhadap pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

Seperti telah dikemukakan bahwa salah satu sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan KKN adalah masyarakat, yaitu terjadinya perubahan masyarakat baik persepsi maupun tindakan dalam kaitannya dengan pembangunan. Manfaat yang dapat dipe-

roleh masyarakat dari pelaksanaan KKN, antara lain seperti disebutkan dalam Buku Pedoman KKN, yaitu :

1. Memperoleh bantuan pemikirn, tenaga, ilmu, teknologi, seni dan pembimbing keagamaan dalam menrencanakan dan melaksanakan pembangunan.
2. Cara berpikir, bersikap dan bertindak dari masyarakat akan lebih ditingkatkan dan sesuai dengan pembangunan.
3. Memperoleh cara-cara baru yang dibutuhkan untuk merencanakan, merumuskan dan melaksanakan pembangunan.
4. Memperoleh pengalaman dalam menggali serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
5. Terbentuknya kader-kader penerus pembangunan di dalam masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan.
6. Memanfaatkan bantuan tenaga mahasiswa untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan ayang berada di bawah tanggung jawabnya. (Panitia Pelaksana KKN IAIN Sunan Kalijaga Angkatan ke-27, 1994 : 15)

Secara teoritis hal di atas sangat dimungkinkan, karena dalam melaksanakan KKN mahasiswa tinggal dan bekrja di desa dalam jangka waktu tertentu. Pada kesempatan ini mahasiswa mengamalkan ilmu, tehnologi, seni dan agama untuk memecahkan permasalahan yang ada di desa dan menanganinya secara pragmatistis dan interdisipliner. Dengan demikian program KKN semestinya sangat membantu dan menunjang pelaksanaan program-program pembangunan di pedesaan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri.

Setelah diketahui bahwa tidak sedikit sumbangan pelaksanaan KKN terhadap jalannya pembangunan, masih juga dihadapkan kepada persoalan lain, yaitu apa peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa KKN dalam memberikan sumbangan itu. Hal ini perlu difahami untuk memperjelas posisi mahasiswa KKN dan apa yang dapat dilakukan mahasiswa selama melaksanakan KKN serta membedakannya dari kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lain di masyarakat, seperti Kuliah Kerja, Kerja Praktek maupun kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh badan/lembaga yang lain, seperti ABRI masuk desa.

Berdasarkan tujuan dan sasaran KKN terhadap masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Buku Pedoman KKN dihubungkan dengan pengertian, ciri dan tujuan pembangunan desa, maka peranan mahasiswa KKN adalah sebagai *inovator, motivator, dinamisator dan problem solver* serta *religious conselor*. Atau secara singkat seperti yang dikemukakan Slamet (1982) mahasiswa KKN berperan sebagai *pembawa perubahan (penyuluh)*. Menurut Slamet, sebagai penyuluh mahasiswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberi informasi. Sebagai orang terpelajar mahasiswa memiliki pengetahuan dan sentuhan media massa yang relatif cukup tinggi, menyebabkan mahasiswa memiliki cukup informasi yang dibutuhkan masyarakat.
2. Pemberi motivasi. Sebagai individu yang independen mahasiswa memiliki posisi yang lebih menguntungkan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Mahasiswa tinggal di desa sehingga mengetahui berbagai aspek kehidupan masyarakat.

kat, ia menjadi mengerti masalah dan kebutuhan yang dapat digunakan untuk memotivasi masyarakat agar mau berubah.

3. Pelancar proses difusi. Dalam pembangunan banyak inovasi yang harus didifusikan. Setiap anggota masyarakat akan menjadi sasaran difusi. Karena di desa kekurangan tenaga untuk pelaksanaan difusi, diharapkan mahasiswa akan dapat membantu melaksanakannya.
4. Penghubung antar sistem. Pada umumnya instansi-instansi pemerintah yang ada hubungannya dengan pedesaan berada di tingkat kabupaten atau kecamatan, yang letaknya umumnya jauh dari desa, juga banyak anggota masyarakat yang belum tahu. Untuk itu diperlukan tenaga penghubung antara masyarakat dengan instansi-instansi tersebut.
5. Pembimbing masyarakat dalam proses pembangunan.

Untuk dapat memerankan sebagai penyuluh dengan baik mahasiswa KKN harus mengetahui metode analisis masalah masyarakat. Dengan metode tersebut mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang dapat digunakan untuk menumbuhkan motivasi masyarakat sebagai kekuatan pendorong untuk merubah. Karena sebagaimana dikemukakan oleh Lippit dkk dan dikutip oleh Gatot Murdjito (1989: 4-5), bahwa ada tiga kekuatan yang mempengaruhi perubahan, yaitu : kekuatan pendorong, kekuatan bertahan dan kekuatan pengganggu.

Kekuatan pendorong, yaitu kekuatan yang ada dalam masyarakat yang bersifat mendorong orang untuk berubah. Kekuatan berasal dari segala aspek situasi yang merangsang orang untuk melakukan perubahan, yang sumbernya bisa berupa-

rupa tetidak puas terhadap situasi yang ada karena ingin situasi yang lain, adanya pengetahuan tentang perbedaan antara situasi yang ada dan situasi yang seharusnya ada, dll.

Dalam hal ini mahasiswa KKN harus berusaha memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan kekuatan pendorong sebesar-besarnya dengan cara menyadarkan orang-orang yang berkepentingan akan adanya masalah yang perlu dipecahkan.

Kekuatan bertahan. Kekuatan ini menolak perubahan yang akan dilakukan yang bersumber dari masyarakat, karena : menentang segala bentuk perubahan, menentang tipe perubahan tertentu saja sudah puas dengan keadaan yang ada, beranggapan sumber perubahan itu tidak tepat , dll.

Terhadap kelompok ini mahasiswa KKN harus memberikan motivasi dan dinamisasi agar persepsi dan perilakunya berubah ke arah yang positif.

Kekuatan pengganggu. Kekuatan ini berasal dari kekuatan dalam masyarakat yang bersaing untuk memperoleh dukungan dan atau karena kekurangan sumber daya dalam bentuk kurang pengetahuan, ketrampilan, tenaga ahli, biaya atau sarana lainnya.

Terhadap kekuatan ini mahasiswa harus mengadakan pendekatan untuk supaya tidak mengganggu dan ikut memecahkan permasalahan yang bisa mengganggu perubahan seperti dengan alih tehnologi, kaderisasi, bentuk problem sumber lainnya.

Dengan demikian kalau mahasiswa KKN mampu menumbuhkan kekuatan pendorong dan menghilangkan atau menekan kekuatan bertahan serta kekuatan pengganggu, maka perubahan di lokasi KKN akan terjadi, sehingga pembangunanpun akan berjalan.

Di dalam praktek ternyata pelaksanaan KKN ini mampu memberikan sumbangan terhadap jalannya pembangunan di pedesaan dan mahasiswa mampu menumbuhkan motivasi masyarakat untuk membangun daerahnya yang berupa prakarsa dan swadaya. Kenyataan ini diakui oleh "birokrat" maupun masyarakat sendiri. Seperti terungkap dalam sarasehan Evaluasi Pelaksanaan KKN Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diadakan tanggal 6 Desember 1994 di Gedung Radyo Suyoso Bappeda Propinsi DIY.

Sutama, sebagai utusan Pemda Kabupaten Sleman dalam kesempatan Evaluasi Pelaksanaan KKN, khususnya di Kabupaten Sleman, mengemukakan sebagai berikut :

Dari hasil pengamatan terhadap pelaksanaan KKN di wilayah Kab. Sleman menunjukkan bahwa hasil dari kegiatan KKN berdampak positif dalam arti sangat membantu program-program pembangunan desa itu sendiri disamping itu dapat menghimpun swadaya masyarakat yang cukup besar dalam menanggapi pelaksanaan kegiatan KKN. Dalam 2 tahun terakhir (93/94 dan 94/95) Pemda Tingkat II Sleman telah menyediakan dana bantuan untuk kegiatan KKN sebesar Rp. 24 Juta dan dapat terhimpun swadaya masyarakat sekitar Rp. 41,2 Juta. Sesuatu yang patut kita banggakan karena dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya membangun desanya akan semakin mudah untuk mencapai tingkat kemandirian masyarakat yang merupakan tujuan PJP II.

Oleh karena itu pelaksanaan KKN yang berkesinambungan dari periode satu ke periode berikutnya pada saat ini masih sangat dibutuhkan terutama di desa-desa "daerah-daerah". (Sutama, 1994: 3)

Demikian pula dari hasil penelitian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada Tahun 1991/1992, 1992/1993 dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 1993, seperti di kemukakan Gatot Murdjito, menunjukkan bahwa mahasiswa KKN telah mampu meningkatkan swadaya masyarakat di lokasi KKN sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

a.1. Dana yang terserap menurut sumbernya dalam kegiatan KKN UGM (Rp. 000).

Tahun	SWD. MASY	PENDA	LPM.UGM	MAHASISWA	LAIN-2	JUNLAH
1992/1993	1.093.877,87	121.323,25	48.540,57	92.543,217	124.211,74	1.490,496
%	70,80	10,90	3,70	6,30	8,30	100
1993/1994	1.695.591,21	193.864,15	46.541,4	172.010,64	220.061,1	2.328,075,5
%	72,83	8,33	2,60	7,39	9,45	100

Dari tabel tampak kegiatan KKN dapat meningkatkan swadaya masyarakat dari 70,80% pada tahun 1992/1993, maka tahun 1993/1994 naik 72,83%, mahasiswa KKN dapat menumbuh kembangkan swadaya masyarakat, baik swadaya dalam pendanaan maupun dalam keterlibatan kerjanya. Dan hal ini tampak masyarakat dididik untuk mandiri (swadaya).

Sementara itu dari hasil penelitian Evaluasi tentang KKN dengan fokus studi masyarakat juga menunjukkan bahwa mahasiswa KKN mampu memotori masyarakat dalam berswadaya,

oleh karenanya pelaksanaan KKN masih perlu dilaksanakan mengenai hal ini. Gatot melaporkan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan umum bahwa mahasiswa dalam pelaksanaan program KKN di daerah pedesaan pada khususnya, telah mampu melaksanakan KKN sesuai dengan maksud dan tujuan dari program KKN itu sendiri.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa pada umumnya pelaksanaan yang telah dilakukan sudah dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian seperti tertulis di bawah ini :

1. Cara pelaksanaan setiap program yang dilakukan oleh mahasiswa rata-rata adalah memberikan dorongan/motivasi.
2. Mahasiswa peserta KKN mampu menumbuhkembangkan swadaya masyarakat, baik swadaya dalam pendanaan maupun dalam keterlibatan kerjanya. Hasil ini mengisyaratkan bahwa dengan adanya KKN, maka masyarakat dididik untuk lebih mandiri (berswadaya).
3. Melalui kehadiran mahasiswa di lokasi KKN, pengetahuan masyarakat lebih berkembang. Masyarakat yang dahulunya tidak tahu sama sekali menjadi sedikit tahu dan yang sedikit tahu menjadi tahu.

Sebagai agent sosial, mahasiswa peserta KKN dalam melakukan pendekatan dan perannya di dalam pembangunan masyarakat desa, hasil dari angket yang diberikan kepada 150 peserta KKN menyatakan sebagai berikut :

Tabel 29. Pendekatan dan Peran Mahasiswa Peserta KKN Dalam Pelaksanaan Program.

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban		
		Sering	Kadang-kadang	Jarang
01.	Merumuskan unsur-unsur metodologis, seperti : analisis situasi, identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, program dan pemantauan, serta evaluasi.	83 %	12 %	5 %
02.	Memakai dasar pengetahuan sosial kemasyarakatan.	70 %	20 %	10 %
03.	Menggunakan Ketrampilan Praktis.	65 %	30 %	5 %
04.	Memiliki kondisi siap mental, fisik dan konsepsional yang disesuaikan dengan bidang-bidang program KKN.	83 %	12 %	5 %

Tabel di atas menjelaskan langkah-langkah, strategi, pendekatan dan peran yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan program KKN. Tujuannya agar supaya perumusan program KKN yang dirancang serta pelaksanaannya sesuai dengan aspek-aspek indikator sosial yang menjadi acuan pembangunan nasional, meliputi :

1. Kependudukan termasuk KB dan transmigrasi
2. Kesehatan dan gizi
3. Pendidikan dan tenaga kerja
4. Perumahan dan kesejahteraan sosial
5. Kehidupan beragama
6. Sarana dan prasarana kegiatan keagamaan
7. Kehidupan sosial-ekonomi dan budaya
8. Keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari hasil penelitian tahap I (penelitian evaluasi, Study Masyarakat); maka diketahui bahwa KKN masih dibutuhkan oleh masyarakat daerah pedesaan. Dengan demikian pelaksanaan KKN masih perlu dilaksanakan, khususnya di daerah pedesaan. Sebagai pertimbangan bahwa di daerah pedesaan sebagian besar masyarakatnya masih kurang dapat menerima arus informasi mengenai pembangunan, baik disebabkan oleh lingkungan alamnya maupun lingkungan yang lainnya: (Gatot Murdjito, 1994 : 4-6).

Demikian halnya dengan pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga yang juga selalu mendapat dukungan dari masyarakat dimana KKN dilaksanakan, maupun dari setempat. Mahasiswa peserta KKN mampu memotivasi masyarakat untuk berswadaya dalam membangun daerahnya. Hal ini dapat diketahui dari Laporan Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-26 Semester Genap Tahun Akademik 1993/1994 dan Angkatan ke-27 Semester Gasal Tahun Akademik 1994/1995.

Untuk Kabupaten Sleman Propinsi DIY, hasil pelaksanaan KKN seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 30. : Alokasi dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Angkatan ke-26 di Kabupaten Sleman dilihat dari bidang program.

NO.	BIDANG PROGRAM	DANA YANG DIKELUARKAN	PRESENTASE
01.	Agama	Rp. 27.477.350,-	28,40 %
02.	Prasarana Fisik dan lingkungan Hidup	Rp. 48.924.050,-	50,55 %
03.	Administrasi pemerintahan	Rp. 4.620.900,-	4,78 %
04.	Pendidikan, Sosial Budaya, Kesehatan dan KB	Rp. 15.746.050,-	16,27 %
	J u m l a h	Rp. 96.768.350,-	100 %

(Laporan Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-26, 1993/1994 : 54-59)

Tabel di atas mengemukakan bahwa dana terbesar digunakan untuk pelaksanaan bidang prasarana fisik dan lingkungan hidup, disusul untuk bidang agama, lalu pendidikan dan sosial budaya, terakhir adalah bidang administrasi pemerintahan.

Dari dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 96.768.350,- di atas, apabila dilihat dari sumbernya adalah sebagai berikut :

Tabel 31. : Sumber dana dalam pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-26 di Kabupaten Sleman.

NO.	SUMBER DANA	BESARNYA DANA	PRESENTASE
01.	Subsidi Pemerintah (berujud uang dan barang)	Rp. 7.377.500,-	7,62 %
02.	Swadaya Masyarakat (berujud uang, barang & jasa/tenaga)	Rp. 43.092.250,-	44,53 %
03.	Peserta KKN	Rp. 10.693.700,-	11,05 %
04.	Donatur lainnya (berujud uang dan barang)	Rp. 35.604.900,-	36,80 %
	J u m l a h	Rp. 96.768.350,-	100 %

(Laporan pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-26 1993/1994 : 59-60)

Dari tabel di atas terlihat bahwa dana terbesar (44.53%) berasal dari masyarakat. Dengan demikian usaha menumbuhkan swadaya masyarakat oleh peserta KKN cukup berhasil. Sumber dana terbesar kedua adalah berasal dari para donatur/dermawan (36,80%). Adanya pihak lain yang mau membantu pendanaan pelaksanaan program kerja mahasiswa KKN, dikarenakan mereka memandang bahwa program tersebut layak untuk dibantu dan karena untuk masyarakat desa, yang umumnya kurang mampu. Tanpa ada kesadaran demikian rasanya mustahil mereka mau membantu, karena bantuan mereka bantuan tanpa pamrih. Mereka bukan sponsor, yang mau menyumbang tapi perusahaan/

produk mereka juga supaya dikenalkan kepada masyarakat, mereka betul-betul donatur murni.

Adapun alokasi dana dan sumber dana dalam pelaksanaan KKN Angkatan ke-27 Semester Gasal Tahun Akademik 1994/1995 di Kabupaten Sleman adalah seperti terlihat di bawah ini :

Tabel 32. Alokasi dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Angkatan ke-27 di Kabupaten Sleman dilihat dari bidang program.

NO.	BIDANG PROGRAM	DANA YANG DIKELUARKAN	PRESENTASE
01.	Agama	Rp. 5.855.850,-	26,34 %
02.	Prasarana Fisik dan lingkungan Hidup	Rp. 11.590.950,-	52,14 %
03.	Administrasi pemerintahan	Rp. 962.600,-	4,33 %
04.	Pendidikan, Sosial Budaya, Kesehatan dan KB	Rp. 3.821.000,-	17,19 %
	J u m l a h	Rp. 22.231.000,-	100 %

(Laporan Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-27, 1994/1995 : 50-53)

Dari tabel di atas kelihatan bahwa alokasi penggunaan dannya sama dengan pelaksanaan KKN Angkatan ke-26, yaitu bidang prasarana fisik dan lingkungan hidup menempati urutan pertama, di susul bidang agama, lalu bidang pendidikan, sosial budaya dan terakhir administrasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa bidang prasarana fisik masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Adapun sumber dananya adalan sebagai berikut :

Tabel 33. Sumber dana dalam pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-27 di Kabupaten Sleman.

NO.	SUMBER DANA	BESARNYA DANA	PRESENTASE
01.	Subsidi Pemerintah (berujud uang dan barang)	Rp. 1.543.500,-	6,94 %
02.	Swadaya Masyarakat (berujud uang, barang & jasa/tenaga)	Rp. 14.368.300,-	64,63 %
03.	Peserta KKN	Rp. 1.135.000,-	5,11 %
04.	Donatur lainnya (berujud uang dan barang)	Rp. 5.184.600,-	23,32 %
	J u m l a h	Rp. 22.231.400,-	100 %

(Laporan pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-27 1994/1995 : 54)

Dalam pelaksanaan KKN angkatan ke-27 pun tetap swadaya masyarakat merupakan sumber dana terbesar, di susul sumbangan donatur, lalu subsidi pemerintah dan terakhir dari peserta KKN sendiri.

Jika dibandingkan mengenai dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan KKN Angkatan ke-26 dengan angkatan ke-27, memang terdapat perbedaan yang mencolok. Pada angkatan ke-26 menghabiskan dana Rp. 96.768.350,-, sedangkan pada angkatan ke-27 hanya menghabiskan dana Rp. 22.231.400,-. Tetapi perbedaan ini dipengaruhi oleh banyaknya lokasi yang ditempati dan banyaknya mahasiswa yang melaksanakan KKN.

Pada Angkatan ke-26 mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga yang melaksanakan KKN di Kabupaten Sleman sebanyak 236 peserta, menempati 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel, di tempatkan di 11 desa dan di bagi dalam 30 kelompok di 30 lokasi, di bawah bimbingan 10 DPL. Sedangkan pada Angkatan ke-27 hanya diikuti oleh 68 peserta, menempati 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Tempel, di 8 desa dan di bagi

menjadi 8 kelompok, 8 lokasi. Sehingga apabila dibandingkan dalam dua angkatan tersebut antara jumlah peserta dengan dana yang di keluarkan, keadaannya hampir seimbang.

Yang menarik adalah adanya kenaikan swadaya masyarakat yang terserap pada angkatan ke-27. Apabila pada angkatan ke-26 swadaya masyarakat yang terserap hanya 44,53 % dari seluruh dana yang dikeluarkan, sedangkan pada angkatan ke-27 mengalami kenaikan sebesar 20,10 %, karena pada angkatan ke-27 swadaya masyarakat yang terserap sebesar 64,63 % dari seluruh pendanaan program kerja. Ini menunjukkan indikasi berperannya mahasiswa KKN dalam memotivasi masyarakat untuk berswadaya dalam membangun daerahnya.

#### D. Pendekatan, Faktor Pendorong dan Penghambat.

##### 1. Pendekatan

Keberhasilan suatu program yang melibatkan banyak pihak dan banyak orang seperti program kerja KKN, tidak saja karena program itu dipandang berguna, akan tetapi sedikit banyaknya ditentukan pula oleh pendekatan yang ditempuh.

Sebagaimana telah diterangkan bahwa pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah berhasil memotivasi masyarakat untuk berswadaya membangun daerahnya. Keberhasilan tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya pendekatan yang tepat baik sebelum pelaksanaan program ataupun sewaktu pelaksanaan program kerja. Adapun pendekatan yang dipakai oleh mahasiswa KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata adalah :

a. Pendekatan agama

Yang dimaksudkan ialah agama dijadikan sebagai pendorong dan penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program kerja KKN pada khususnya dan program pembangunan pada khususnya, sehingga pembangunan dinilai sebagai amal ibadah.

Pendekatan ini dipakai karena sebagaimana diketahui bahwa sebagai Perguruan Tinggi mempunyai basic keahlian di bidang ilmu pengetahuan agama Islam dan sosial kemasyarakatan. Disamping itu karena agama Islam sendiri memang memerintahkan umatnya untuk merubah nasibnya (membangun) karena Allah sendiri tidak akan merubah nasib suatu bangsa, kecuali bangsa itu sendiri yang berusaha merubah nasibnya.

Dengan pendekatan ini program-program pembangunan diterjemahkan dan disampaikan dalam bahasa agama. Sehingga pembangunan itu tidak saja merupakan perintah agama. Sehingga pembangunan itu tidak saja merupakan kebutuhan tapi juga memang merupakan perintah agama. Karena bangsa Indonesia bangsa yang agamis, maka pendekatan agama dalam memotivasi masyarakat untuk membangun, adalah cukup berhasil.

Sebagai contoh, sewaktu mahasiswa mau mengadakan kerja bakti kebersihan lingkungan, sebelumnya masyarakat dikumpulkan dahulu--sudah banrang tentu dengan bantuan dan koordinasi aparat desa atau tokoh masyarakat--dan diberikan pengertian bahwa bersih itu saja indah dan sehat,

tetapi juga merupakan sebagai ndaripada iman. Iman tidak sekedar dalam pengakuan tetapi harus direalisasikan. Untuk itu mari kita bekerja bakti membersihkan lingkungan insya Allah. kerja kita akan mendapat ridla dan pahala dari Allah. Demikian sekedar gambaran bagaimana agama dijadikan alat untuk memotivasi masyarakat dalam membangun.

#### b. Pendekatan Sosiologi

Hal ini dikarenakan yang dihadapi mahasiswa KKN bukan benda mati, melainkan masyarakat manusia yang mempunyai norma, tradisi dan tatanan-tatanan hidup.

Denggan pendekatan ini diharapkan pelaksanaan KKN tidak akan merusak tatanan masyarakat yang sudah mapan, bahkan sebaliknya program KKN akan mendapat dukungan masyarakat. Sebagai conto di lokasi KKN yang baru saja diadakan pilihan kepala desa (pilkades) tidak jarang menimbulkan efek terpecahnya masyarakat kepada beberapa kelompok, paling tidak kelompok pendukung yang jagonya menang, dan kelompok pendukung yang jagonya kalah. Perpecahan demikian biasanya memakan waktu cukup lama. Dalam kondisi demikian tidak semestinya peserta KKN memihak kepada satu kelompok, sebab dia tidak akan meperoleh simpatik dari kelompok, satunya, bahkan program-program KKN tidak mustahil tidak akan didukung oleh kelompok yang tidak bersimpati tersebut. Oleh karena itu hendaknys peserta KKN bisa menempatkan diri secara netral.

Demikian pula halnya sekalipun ada diantara peserta KKN yang tidak biasa tahlilan, tapi kalau diundang oleh masyarakat di lokasi KKN yang mempunyai tradisi tahlilan, hendaknya ia mendatangi undangan tersebut sekalipun hanya sekedar datang, kalau tidak maka simpati masyarakatpun akan berkurang dan sudah barabg tentu pada akhirnya akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program kerjanya.

c. Pendekatan Tokoh Kunci.

Tokoh kunci adalah orang yang terpandang dan mempunyai pengaruh cukup besar di masyarakat. Apa yang diperintahkan atau dilarangnya bisa ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu pendekatan kepada tokoh kunci ini menjadi penting dalam pelaksanaan KKN. Tidak jarang suatu program sekalipun dipandang baik dan bermanfaat, kurang terlaksana karena belum mendapat restu dari tokoh kunci.

Beberapa tokoh kunci yang ada di pedesaan dan biasa mendapat perhatian dari mahasiswa KKN dapat disebutkan :

- 1) Pemimpin formal, seperti kepala desa dan aparat desa lainnya.
- 2) Pemimpin keagamaan, seperti kyai, ulama, pendeta atau pastor.
- 3) Pemimpin adat, yaitu tokoh-tokoh yang berkaitan dengan tradisi yang hidup di masyarakat.
- 4) Orang lain yang dianggap terpandang oleh masyarakat karena kemampuan ekonominya atau karena jabatannya.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat.

### a. Faktor pendukung.

Keberhasilan pelaksanaan KKN di lokasi/masyarakat tidaklah semata-mata karena faktor mahasiswa atau DPL, akan tetapi karena adanya bantuan, dukungan dari berbagai pihak.

Dari informasi yang diberikan Panitia Pelaksana KKN IAIN Sunan Kalijaga, peserta KKN, aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri, dapat dikemukakan bahwa yang dipandang sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah :

- 1) Adanya kerjasama dan sistem koordinasi yang harmonis antar peserta KKN selaku pelaksana utama dari program-program yang telah disusun.
- 2) Terciptanya hubungan yang baik antara peserta KKN, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Panitia Pelaksana KKN, Aparatur Pemerintah, Institut dan Masyarakat luas.
- 3) Adanya penilaian yang positif terhadap KKN dan peran aktif mahasiswa dalam berbagai kegiatan di tengah-tengah masyarakat.
- 4) Semangat warga desa untuk lebih maju dan gotong-royong yang tinggi dalam berbagai kegiatan.
- 5) Desa merasa mendapat tenaga penggerak pembangunan dan mendapat tenaga bantuan untuk memikirkan bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat.
- 6) Masyarakat sudah semakin terlatih untuk menelaah,

menyusun dan melaksanakan program secara pragmatis dan interdisipliner. Masyarakat desa semakin merasa mendapat tambahan informasi, pengetahuan dan ketrampilan dengan datangnya mahasiswa peserta KKN.

- 7) Masyarakat yang ditempati mayoritas beragama Islam.
- 8) Adanya bantuan dari pihak luar, baik yang berupa materi maupun non materi.

b. Faktor Penghambat.

Walaupun KKN dalam beberapa hal telah menunjukkan hasil yang positif, harus diakui pula dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan banyak pula kendala-kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi dapat disebutkan :

- 1) Arti, maksud dan tujuan KKN kadang-kadang kurang dipahami oleh masyarakat pedesaan, sehingga KKN disamakan dengan ABRI masuk Desa, atau KKN dianggap sebagai penyandang dana.
- 2) Orientasi lapangan waktunya terlalu singkat, sehingga data yang ada hanya menyangkut data fisik, dan program kerja mahasiswa lebih banyak program fisik.
- 3) Pada lokasi tertentu, utamanya desa-desa yang berdekatan dengan suasana kota, partisipasi masyarakat kurang, sehingga mahasiswa kadang-kadang bekerja sendiri.
- 4) Adakalanya program kerja tidak berjalan lancar karena kekurangan dana penunjang oleh sebab swadaya masyarakat sangat terbatas.

- 5) Persepsi KKN yang kadang-kadang masih rancu di kalangan Pemerintah Daerah, khususnya aparat tingkat kecamatan ke bawah.
- 6) Dana stimulan dari Pemerintah Daerah belum seluruhnya dianggarkan dalam APBD.
- 7) Kesulitan mendapatkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang baik (idealis, pragmatis, mobilitas tinggi, luas wawasan dan komunikatif).
- 8) Terbatasnya waktu KKN yang tersedia (hanya 2 bulan).

Selain kendala di atas, menurut seorang kepala desa yang daerahnya sering dijadikan ajang KKN oleh berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta, kendala lain dalam pelaksanaan KKN di daerahnya adalah :

- 1) Kadang-kadang terdapat mahasiswa yang kurang trampil, kualitas SDM kurang, akibatnya kegiatan hanya menopang kepada teman-temannya.
- 2) Kadang-kadang kurang memahami eksistensinya sebagai mahasiswa yang senantiasa disorot oleh masyarakat desa, seperti : membawa budaya kota, kurang patuh memakai helm.
- 3) Kadang-kadang kurang memahami birokrasi pemerintahan, misalnya : sering mengeluh, adanya syarat-syarat tertentu untuk kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masyarakat banyak seperti pentas seni, pengajian dll.
- 4) kurang memahami arti konsultasi
- 5) Kadang-kadang bukan memecahkan masalah tetapi menambah masalah seperti : mempengaruhi masyarakat, minum-minuman keras, mabuk-mabukan dll.

6) Obyek KKN, yaitu masyarakat desa tetapi subyeknya berubah yaitu perguruan tinggi yang berbesa-besa, hal itu membuat warna KKN di desa berubah-ubah sesuai dengan perguruan tinggi yang bersangkutan. (*Kepala Desa Gerbosari, 1994 : 2-3*).

Dari apa yang dikemukakan kepala desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, kabupaten Kulonprogo di atas, khusus mengenai kendala nomor 5 (lima), mungkin betul bagi perguruan tinggi lain, tetapi untuk peserta KKN IAIN Sunan Kalijaga sepanjang pengetahuan Panitia Pelaksana belum pernah terjadi.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN.

Atas dasar uraian dari bab ke bab terdahulu, akhirnya sampailah pada beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu wujud nyata program dari IAIN yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa adalah program KKN, ialah :

- a. Personality development, yang berarti dengan adanya interaksi sosial selama KKN diharapkan adanya perubahan sikap pada mahasiswa berkenaan dengan dedikasinya dan orientasinya terhadap masyarakat.
- b. Di dalam masyarakat sendiri diharapkan terjadi perubahan-perubahan (*community development*) baik cara berpikir, bersikap dan bertindak tanduk selaras dengan tujuan pembangunan.
- c. Dampak dari KKN terhadap institusional development, tujuannya untuk memperoleh masukan yang sangat berguna bagi evaluasi dan pengembangan kurikulum IAIN dan kebutuhan masyarakat.

Melihat sasaran tersebut, KKN yang diprogramkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai tujuan :

- a. Membantu pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan.
- b. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan lahir-batin.

- c. Menempatkan agama sebagai pendorong dan penggerak serta sumber nilai bagi masyarakat, sehingga operasionalisasi pembangunan merupakan amal ibadah bagi mereka.
- d. Sebagai umpan balik dalam perbaikan sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Sehubungan dengan tujuan di atas program KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi :

- a. Bidang Agama
  - b. Bidang Prasarana Phisik dan Lingkungan Hidup
  - c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
  - d. Bidang Pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
2. Bahwa DPL dalam menjalankan tugasnya sebagai pembimbing mempunyai peran strategis dalam terlaksananya program KKN, meliputi membimbing peserta KKN, pengarah dan pemberi motivasi, penghubung antara mahasiswa dengan aparat pemerintah dan masyarakat setempat serta dengan Panitia Pelaksana; Pengawas sekaligus penilai kegiatan mahasiswa peserta KKN, serta memberikan suri tauladan yang baik.

Sehubungan dengan peran yang diemban oleh DPL sebagaimana tersebut di atas, maka persiapan pembekalan baik phisik, mental, pengetahuan tentang KKN dan ke-trampilan dalam melakukan interaksi sosial sangat diperlukan oleh DPL.

3. Bahwa mahasiswa peserta KKN merupakan social agent bagi masyarakat desa (khalayak sasaran). Dengan demikian mereka memiliki peran dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemberi informasi yang dibutuhkan masyarakat desa.
- b. Pemberi motivasi untuk menumbuhkembangkan sumber daya dan swadaya masyarakat desa.
- c. Pelancar proses difusi dalam pembangunan masyarakat desa.
- d. Penghubung antar sistem, sehingga terjalin kerja sesuai dengan program pembangunan.
- e. Pembimbing masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara operasional peranan mahasiswa peserta KKN mempunyai target sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap kewajiban melaksanakan pembangunan baik yang bersifat material maupun mental spiritual.
- b. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam memecahkan problematika yang dihadapi.
- c. Penghayatan dan pengamalan keagamaan masyarakat akan semakin baik, sehingga masyarakat insaf akan pentingnya peran agama dalam setiap dinamika pembangunan.
- d. Mengembangkan harkat dan martabat serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa, dalam suasana agamis, adil, makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Bahwa secara optimal sumbangan konkrit pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga kepada masyarakat dan pemerintah dapat disebutkan sebagai berikut :

a. *Bidang agama, meliputi :*

- 1). Terbinanya masyarakat desa dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama Islam.
- 2). Terbentuknya kader-kader muda Islam sebagai agent pembangunan desa
- 3). Terselenggaranya kegiatan-kegiatan keagamaan di desa, seperti pengajian, bimbingan keagamaan dan penyuluhan.
- 4). Terwujudnya kemakmuran tempat ibadah dengan berbagai aktivitas kegiatannya.
- 5). Terealisasinya pendirian TPA/TKA beserta kegiatannya.
- 6). Tumbuhnya sumber daya dan swadaya masyarakat desa.

b. *Bidang Prasarana Fisik dan lingkungan Hidup, meliputi :*

- 1). Pengadaan dan atau restorasi tempat ibadah
- 2). Pengadaan alat-alat perlengkapan yang dibutuhkan tempat ibadah
- 3). Pengadaan sarana fisik lingkungan desa yang dibutuhkan.
- 4). Jambanisasi, pengadaan air bersih dan sanitasi yang sesuai dengan kondisi desa.
- 5). Penghijauan melalui kerja bakti dan reboisasi.

c. *Bidang Adminsitrasi Pemerintahan Desa, meliputi :*

- 1). Membantu aparat pemerintahan desa menertibkan administrasi desa.
- 2). Pembinaan administrasi yang berkaitan dengan data monografi dan demografi desa.
- 3). Membantu tertib administrasi yang berhubungan dengan kegiatan PKK, Dasa Wisma dan LKMD.
- 4). Pengadaan atau pembenahan perpustakaan untuk masjid, kantor desa dan Karang Taruna.

d. *Bidang Pendidikan, Sosial Budaya, Kesehatan dan KB, meliputi :*

- 1). Pemasyarakatan wajib belajar paket A dan B, serta pemberantasan buta aksara al-Qur'an.
- 2). Pembinaan generasi muda desa melalui berbagai pelatihan: perpustakaan, home industri, manajemen dan administrasi, dan kader dakwah.
- 3). Penyuluhan dan peningkatan kesadaran akan kesehatan dan gizi.
- 4). Pemasyarakatan program kependudukan, terutama program Keluarga Berencana (KB).
- 5). Melakukan pembinaan sosial budaya masyarakat desa dengan target agar supaya masyarakat desa secara dinamik melaksanakan pembangunan yang diprogramkan pemerintah.
- 6). Menyadarkan masyarakat desa akan pentingnya wajib belajar sembilan tahun.

Hasil tersebut di atas tak lepas dari faktor pendekatan , faktor penghambat dan faktor pendukung, sehingga untuk mencapai target maksimal dari pelaksanaan program KKN dilakukan evaluasi dan perbaikan.

## B. SARAN-SARAN

Bidang garap program KKN IAIN ingin memobilisasi *human and natural resources* masyarakat desa yang dililit kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan kerawanan akidah melalui pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan keislaman. Dengan demikian pembedaan program kerja KKN IAIN sangat relevan dengan program pembangunan nasional dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu agar supaya pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga mencapai *fokus sasaran* yaitu "mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis-mandiri yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan program pembangunan nasional, harus diupayakan

1. Materi pembekalan yang diberikan kepada peserta KKN perlu diperbanyak materi yang berupa keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan dan sesuai dengan keadaan masyarakat pedesaan. Demikian juga waktu yang disediakan perlu ditambah sehingga mahasiswa mempunyai kesempatan melaksanakan praktikum.
2. DPL diharuskan untuk mengetahui dan menghayati mekanisme penyelenggaraan KKN secara menyeluruh, sehingga

efektifitas pembimbingan dan pemantauan dapat dilaksanakan maksimal. Dalam meningkatkan efektifitas pembimbingan dan pemantauan beberapa faktor seperti kesiapan dan kemampuan DPL dalam menguasai dan mensosialisasikan hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan KKN, intensitas dan kualitas pembimbingan dan pemantauan, waktu dan frekuensi pembimbingan metoda pembimbingan perlu dirumuskan sedemikian rupa.

3. Mahasiswa peserta KKN sebagai agent sosial, dalam melaksanakan program KKN harus mempertimbangkan unsur-unsur metodologi pelaksanaan, pengetahuan sosial bermasyarakat, ketrampilan praktis, penguasaan Rencana Program Kerja dan Kondisi sikap mental, phisik dan konseptual.
4. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas prgram KKN, diupayakan agar pada masa-masa mendatang program KKN dikembangkan dengan program lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, dan hal ini akan mengurangi munculnya kejenuhan masyarakat desa lokasi KKN.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ancok, Djamaluddin (1990)  
"Kualitas masyarakat dan pembangunan : Mencari tolok ukur dampak pembangunan terhadap kualitas masyarakat", Makalah disampaikan dalam seminar nasional Ilmu-Ilmu Sosial dan Konggres Hipiis, Yogyakarta.
- Chirzin, Habib (1991)  
"Teologi Pembangunan : Perspektif Islam", Makalah Seminar Nasional PAU-Studi Sosial, UGM, Yogyakarta.
- Effendi, Sofyan (1990)  
"Sistem Administrasi Untuk Pembangunan Kualitas Manusia", dalam Prospek 2 (1).
- Hagul, Nichoff A. (1985)  
A Case of Sosial Change, Aldine Publishing Company, Chicago.
- IAIN Sunan Kalijaga (1994)  
Buku Pedoman KKN Angkatan ke-26, BPPM-P3M, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- IAIN Sunan Kalijaga (1994)  
Buku Pedoman KKN Angkatan ke-27, BPPM-P3M, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- IAIN Sunan Kalijaga (1994)  
Laporan Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-26, Panitia Pelaksana KKN Angkatan ke-26 Tahun Akademik 1993/1994, Yogyakarta.
- IAIN Sunan Kalijaga (1994)  
Surat Edaran Nomor 014/Panpel.KKN/XXVI/1994, Panitia Pelaksana KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-26, Yogyakarta.
- IAIN Sunan Kalijaga (1994)  
Laporan Pelaksanaan KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan ke-27, Panitia Pelaksana KKN Angkatan ke-27 Tahun Akademik 1993/1994, Yogyakarta.
- Murdjito, Gatot (1989)  
"Peranan mahasiswa KKN Dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan", Makalah disampaikan pada Penataran DPL KKN IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Murdjito, Gatot (1994)  
"Keberhasilan KKN dan Kendala Yang Dihadapi", Makalah disampaikan pada Sarasehan Evaluasi Pelaksanaan KKN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Desa Gerbosari (1994)

"Hasil, Kendala dan Upaya Pemantapan Pelaksanaan KKN di Pedesaan (Suatu Evaluasi Pelaksanaan KKN di Desa Gerbosari)", Makalah disampaikan pada Saresehan Evaluasi Pelaksanaan KKN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mubyarto (1985)

Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan, BPFE, P3PK-UGM. Yogyakarta.

Rahmat, Masykur (1989)

"Mekanisme Pembimbingan Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa KKN", Makalah disampaikan pada Penataran DPL KKN IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Slamet, Margono (1982)

Mahasiswa Dalam Pembangunan, Penerbit Universitas Lampung.

Sutama, (1994)

"Evaluasi Pelaksana Program KKN di Kabupaten Dati II Sleman", Makalah disampaikan pada Saresehan Evaluasi Pelaksanaan KKN di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PEDOMAN WAWANCARA  
UNTUK DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN

A. Data Pribadi :

1. Nama : .....
2. Jenis kelamin : .....
3. Umur : .....
4. Kedudukan dalam masyarakat : .....

B. Pengalaman menjadi DPL dalam KKN :

1. Sudah berapa kali menjadi DPL dalam KKN IAIN Sunan Kalijaga ? : .....
2. Sebelum program KKN dilaksanakan, apa yang saudara lakukan sewaktu memasuki desa KKN pertama kali : .....
- .... ; mengapa demikian ? : .....
3. Persiapan-persiapan apakah yang saudara lakukan dalam rangka observasi lapangan desa KKN ? : .....
4. Sebagai DPL KKN, dasar pemikiran apakah yang saudara pergunakan dalam mendampingi dan mengarahkan mahasiswa peserta KKN sewaktu melaksanakan tugas KKN ? : .....

5. Uraikan menurut saudara motivasi dan bimbingan secara operasional dalam proses bermasyarakat hubungannya dengan program KKN : .....
6. Apakah yang saudara lakukan dalam membina kerjasama antara DPL, peserta KKN, pemerintah terkait dan masyarakat desa : .....
7. Sejauh ini, sebagai DPL yang sudah berpengalaman, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan penunjang hubungannya sebagai peran DPL KKN ? : .....

C. Koordinasi DPL dan Pan-Pel.

1. KKN sebagai program intra kurikuler yang sekaligus bermakna sebagai pengabdian pada masyarakat, perlu disikapi secara akademik. Peran dan dedikasi apakah yang harus saudara lakukan (sebagai DPL) kaitannya dengan program KKN, dengan tidak harus mengesampingkan nilai-nilai akademik ? : .....
2. Untuk itu Pan-Pel KKN perlu merumuskan kaidah-kaidah program KKN, baik bersifat kurikuler dan pengabdian. Secara ideal, bagaimana tanggapan saudara tentang pelaksanaan KKN selama ini ? : .....
3. Untuk mencapai tujuan KKN, yaitu merubah masyarakat desa dari faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan

kemiskinan dan keterbelakangan, pendekatan dan strategi apa yang saudara gunakan (sarankan) ? : .....

.....

4. Koordinasi DPL dan Pan-Pel sangat diperlukan untuk mencapai tujuan KKN (lihat item No. 3); uraikan pengalaman saudara sewaktu menjadi DPL KKN ? : .....

.....

5. Apa yang saudara lakukan (sebagai DPL KKN) sewaktu di desa lokasi KKN bersama-sama dengan para peserta KKN dalam memecahkan masalah dan merealisasikan program pembangunan desa : .....

.....

.....

ANGKET UNTUK MAHASISWA PESERTA  
KULIAH KERJA NYATA

A. Data Pribadi:

1. N a m a : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Fakultas/Jurusan : .....
4. Semester : .....
5. Program KKN bidang : .....

B. Kegiatan dan Masa Kerja Lapangan

1. Uraikan pernyataan saudara, bahwa sebelum saudara diterjunkan ke lokasi desa KKN, saudara mendapatkan pembekalan materi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program KKN. Apakah hal tersebut sudah sesuai atau belum .....
2. Bagaimanakah pendapat saudara tentang KKN IAIN dan pembangunan masyarakat pedesaan ? : .....
3. Kalau demikian, langkah-langkah apakah yang saudara persiapkan sehubungan dengan program KKN ? :
  - a. Masa observasi dan orientasi: .....
  - b. Masa merumuskan program : .....
  - c. Masa pelaksanaan program : .....
  - d. Masa evaluasi program : .....

4. Hal-hal apakah yang saudara lakukan untuk mendapatkan masukan yang berkaitan dengan permasalahan desa KKN, sehingga tujuan KKN untuk menumbuhkan swadaya masyarakat desa tercapai ?:

a. Langkah-langkah: .....

.....  
.....

b. Peran yang dilakukan: .....

.....  
.....

c. Strategi dan pendekatan: .....

.....

C. Pelaksanaan Program Kerja KKN

1. Faktor penunjang dan penghambat yang berkaitan dengan kegiatan bidang keagamaan : .....

.....  
.....

2. Faktor penunjang dan penghambat yang berkaitan dengan kegiatan bidang prasarana fisik dan lingkungan hidup ..

.....  
.....

3. Faktor penunjang dan penghambat yang berkaitan dengan kegiatan bidang administrasi pemerintahan : .....

.....  
.....



PEDOMAN WAWANCARA UNTUK  
ANGGOTA MASYARAKAT

A. Latar Belakang Kehidupan Responden:

1. N a m a : .....
2. Jenis kelamin : .....
3. Usia/Tahun lahir : .....
4. Tempat lahir : desa ini/desa lain/keterangan -  
lain: .....
5. Agama : .....
6. Status di masyarakat : a. pejabat pemerintah desa  
b. pejabat pemerintah kecamatan  
c. tokoh agama  
d. tokoh masyarakat  
e. kepala keluarga (biasa)  
f. ....
7. Pendidikan : a. Tidak Sekolah  
b. SR/SD  
c. S L P  
d. S L A  
e. Perguruan Tinggi  
f. Akademi  
g. Madrasah  
h. Pondok Pesantren  
i. ....
8. Pekerjaan : a. petani penggarap  
b. petani pemilik sawah  
c. pedagang

- d. pengusaha
- e. tukang
- f. pegawai negeri
- g. guru umum
- h. guru agama
- i. A B R I
- j. ....

**B. Keterangan Tentang Potensi Desa**

1. Desa ini tergolong desa yang bagaimana ? : .....
- a. Sosial-ekonomi desa : .....
- .....
- .....
- b. Sosial-budaya desa : .....
- .....
- .....
- c. Situasi politik dan kehidupan masyarakat : .....
- .....
- .....
- .....
- d. Hasil bumi desa : .....
- .....
- .....
- e. Kehidupan keagamaan warga masyarakat : .....
- .....
- .....
- .....

2. Coba terangkan menurut pengetahuan bapak/ibu/sdr. masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintahan desa:

a. Bidang pemerintahan desa : .....

.....  
.....

b. Kondisi dan keadaan administrasi desa : .....

.....  
.....

c. Keadaan aparat/pamong desanya : .....

.....  
.....

d. Bagaimana dengan kegiatan LKMD ? : .....

.....  
.....

e. Apakah di desa ini ada Koperasi Desa ? : .....

..... ; mengapa demikian ? : .....

.....  
.....

f. Bagaimana dengan kegiatan bapak-bapak, pemuda/remaja, maupun ibu-ibu yang berkaitan dengan program pembangunan desa yang dikelola oleh pemerintahan desa ? :

.....  
.....  
.....  
.....

g. Kegiatan-kegiatan lain yang bapak/ibu/sdr. ketahui :

.....  
.....  
.....

3. Jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, gizi, dan keluarga berencana di desa ini ? (pewawancara harus cermat dan teliti): .....

.....  
.....  
.....

4. Jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di desa ini, seperti: perkumpulan bapak-bapak, perkumpulan ibu-ibu, kelompok pemuda/remaja, pengajian, kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pembangunan desa, gedung pertemuan, sekolahan, madrasah, TPA, rumah ibadah, irigasi, kelompok tani, dan lainnya: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Bapak/Ibu/Saudara. akan dapat menceritakan secara jujur tentang keadaan dan kondisi :

a. Ekonomi warga masyarakat:.....

.....

b. Perumahan warga masyarakat :.....  
.....

(harap ditanyakan perabot rumah tangga yang dimiliki, jamban, keadaan air yang dipakai, penerangan dan konsumsi sehari-hari).

c. Keadaan kehidupan sosial sehari-hari :  
.....  
.....  
.....  
.....

d. Ceriterakanlah hal-hal sebagai berikut :  
- masalah-masalah yang dapat menumbuhkan gotong-royong warga masyarakat :.....  
.....  
.....  
- masalah-masalah yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan warga masyarakat :.....  
.....  
.....  
- hal lain yang dianggap perlu dan penting :.....  
.....  
.....  
.....

C. Program KKN IAIN Sunan Kalijaga :

1. Ceriterakanlah sehingga bapak/ibu/sdr. mengenal IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: (harap pewawancara mencatat serinci mungkin dari ceritera responden; ini sangat penting)

.....  
.....  
.....

2. Jelaskan menurut pengetahuan bapak/ibu/sdr. tentang kuliah kerja nyata (KKN IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

.....  
.....  
.....

3. Apakah KKN IAIN Sunan Kalijaga sangat penting dan bermanfaat untuk desa saudara : .....

.....  
.....

4. Ceriterakanlah tanggapan, sikap, dan pernyataan bapak/ibu/sdr. sehubungan dengan pelaksanaan program KKN yang dilaksanakan mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:.....

.....  
.....  
.....

5. Bagaimana kontak hubungan sosial (srawung) peserta KKN dengan :

a. Warga masyarakat : .....

.....  
.....

Dalam kepentingan apa : .....

.....  
.....

b. pemuda/remaja: .....

.....  
.....

Dalam kepentingan apa : .....

.....  
.....

c. Tokoh Masyarakat : .....

.....  
.....

Dalam kepentingan apa : .....

.....  
.....

d. Tokoh agama : .....

.....  
.....

Dalam kepentingan apa : .....

.....  
.....

e. Pamong Desa : .....

.....  
.....

Dalam kepentingan apa : .....

.....

.....

6. Bagaimana pelaksanaan program kerja KKN bidang keagamaan, ceritakanlah menurut pengalaman bapak/ibu/sdr.:

.....

.....

.....

.....

.....

Bagaimana menurut tanggapan bapak/ibu/sdr. tentang pelaksanaan program tersebut di atas / : .....

.....

.....

.....

7. Bagaimanakah pelaksanaan program bidang prasarana fisik dan lingkungan hidup, ceritakanlah menurut yang bapak/ibu/sdr. ketahui : .....

.....

.....

.....

.....

8. Bagaimana pelaksanaan program kerja bidang administrasi pemerintahan desa, sebabkan yang bapak/ibu/sdr. ketahui

.....

.....

.....

